**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

**RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan oleh :**

**Nama : M. RIZKI**

**Nomor Induk Mahasiswa : B10019358**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Judul Skripsi : Tinjauan Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas Dalam Persfektif *World Trade Organization (WTO)***

**Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah**

**Ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum**

**Universitas Jambi**

 **Jambi, 30 Oktober 2023**

**Pembimbing I, Pembimbing II,**

**Novianti, S.H., LL.M. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H.**

**NIP. 197511292001122002 NIP. 198506222008121003**

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

**RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan oleh :**

**Nama : M. RIZKI**

**Nomor Induk Mahasiswa : B10019358**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Judul Skripsi : Tinjauan Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas Dalam Persfektif *World Trade Organization (WTO)***

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 30 Oktober 2023 dan dinyatakan LULUS**

**TIM PENGUJI**

**NAMA JABATAN TANDA TANGAN**

**Mochammad Farisi, S.H., LL.M. Ketua Tim Penguji ……………………**

**Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H. Sekretasis ……………………**

**Bernard Sipahutar, S.H., M.H. Pembahas Utama ……………………**

**Novianti, S.H., LL.M. Pembimbing II ……………………**

**Dr. Akbar Kurnia Putra S.H., M.H. Pembimbing II ……………………**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Prof. Dr. Usman, S.H., M.H**

**NIP. 196405031990031004**

**PERNYATAAN ORSINILITAS**

Dengan menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 30 Oktober 2023

 Yang membuat pernyataan

|  |
| --- |
| Materai10000 |
|   |

 **M. RIZKI**

 **B10019358**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Tinjauan Prinsip Non Diskriminasi Impor Pakaian Bekas Dalam Persfektif World Trade Organization (WTO).*** Skripsi merupakan mata kuliah wajib Fakultas Hukum Universitas Jambi, bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana dan bertujuan untuk melatih mahasiswa menuangkan pemikirannya melalui karya ilmiyah dalam bentuk tulisan Skripsi.

Selama Penulis mengikuti perkuliahan telah banyak menimba ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para dosen Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat menambah wawasan khususnya keilmuan dibidang hukum kepidanaan maupun dibidang ilmu hukum lainya, terutama atas bimbingan dari Novianti, S.H., LL.M. Pembimbing I dalam pengerjaan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dengan tulus, ikhlas dan dedikasi yang tinggi telah memberikan bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya dan Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H.,M.H. Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang dengan kesabaran,tulus, dan ikhlas yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai rencana.

 Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang membantu, baik bantuan moril maupun materi untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis yang tersinta, yaitu Ayahanda tercinta Akmal Said, S.Pd., M.Pd. dan Ibunda tercinta Dra. Asmalinar. Terimakasih yang tiada tara atas motivasi, nasehat, cinta, perhatian, kasih saying, dukungan moral dan materil, serta doa dan kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Serta Abang saya Afdhal S.H dan Khasmal S.Hut yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dilingkungan Universitas Jambi serta tersedianya para dosen-dosen yang berkualitas dan berwawasan luas guna mempermudah penulis dalam mengikuti kegiatan perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi;
3. Dr. Usman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akademisi penulis;
4. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akademisi penulis;
5. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan penulis;
6. Dr. A. Zarkasih, S.H.,M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan;
7. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H.,M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, serta Pembimbing II yang memberikan kemudahan dalam pengurusan akademik dan adminitrasi pada Program Studi Ilmu Hukum;
8. Rahayu Repindowaty Harahap, S.H.,LL.M. Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini;
9. Novianti,S.H.,LL.M., Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing, memberikan masukan, arahan, kritikan, dan dukungan serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya;
10. Bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan;
11. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian;
12. Teman-teman mahasiwa mahasiswi Fakultas Hukum yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Terakhir terimakasih buat diri sendiri, yang sudah sangat kuat menjalani ini semua, sudah melewati banyak rintangan, masalah realita yang kadang tak sesuai dengan kenyataan, besarnya beban yang harus dipikul dan adanya tanggung jawab membahagiakan orang tua.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak ibu serta teman-teman semua, semoga skripsi ini memberikan pembelajaran yang bermanfaat.

 Jambi,30 Oktober 2023

 Penulis

 M. RIZKI

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Prinsip *Non Diskriminasi Impor* Pakaian Bekas Dalam Presfektif *World Trade Organization* (WTO) dan Untuk menganalisis dan mengkritisi kegiatan impor pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang. Adapun rumusan masalah: 1) Bagaimana Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas Dalam Presfektif *World Trade Organizaton (WTO)*? dan 2) Apakah Kegiatan Import Pakaian Bekas Bertentangan dengan Undang-Undang di Indonesia?.Dengan rumusan masalah tersebut metode yang digunakan adalah yuridis *Normatif*, hasil penelitian terkait dengan 1) WTO *Ministrerial Decision* walaupun terpisah dari WTO *Valuation Agreement*, karena merupakan bagian dari WTO *Agreement* maka status keberlakukan dan kekuatan hukumnya sama dengan WTO *Valuation agreement*. Adapun terhadap produk-produk hukum *World Customs Organization* berupa *Advisory Opinion, Commentaries, Explanatory Notes, dan Case Studies* yang telah dikeluarkan WCO *Technical Committee on Customs Valuation dalam Valuation Compendium-nya*,. Dalam praktek pengadilan Indonesia dapat digunakan metode interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan legal effect pada substansi Perjanjian Internasional. dan 2) Pada dasarnya ketentuan WTO dalam putaran Uruguay yang mencantumkan prinsip non-diskriminasi menginginkan adanya suatu komitmen dari setiap negara dalam transaksi perdagangan internasional untuk memberlakukan sistem yang adil, liberalisasi perdagangan, penghapusan hambatan, dan transparansi. Dengan demikian, seyogyanya dapat dijadikan guidance untuk negararanegara anggota guna mengadopsi dan menerapkannya dalam legislasi nasional mereka dengan pertimbangan yang lebih luas guna terciptanya tatanan perdagangan dunia yang tertib sebagaiman Tujuan dari Hukum perdagangan Interasional menurut GATT dan WTO.

**Kata Kunci:** ***Non Diskriminasi, Impor* Pakaian Bekas dan *World Trade Organizat***

**ABSTRACT**

**Overview of the Principles of Non-Discrimination on the Import of Used Clothing in the World Trade Organization (WTO) Perspective**

The objectives of this study are: To know and analyze the Principle of Non-Discrimination in the Import of Used Clothing in the Perspective of the World Trade Organization (WTO) and To analyze and criticize used clothing import activities based on the Law. The formulation of the problem: 1) What is the principle of non-discrimination on the import of used clothes in the prefective of the World Trade Organization (WTO)? and 2) Is the Activity of Importing Used Clothing Contrary to the Law in Indonesia? With the formulation of the problem, the method used is Normative juridical, the results of research related to 1) WTO Ministrerial Decision even though it is separate from the WTO Valuation Agreement, because it is part of the WTO Agreement, the status of its enforcement and legal force is the same as the WTO Valuation agreement. As for the legal products of the World Customs Organization in the form of Advisory Opinions, Commentaries, Explanatory Notes, and Case Studies that have been issued by the WCO Technical Committee on Customs Valuation in its Valuation Compendium,. In practice, Indonesian courts can use interpretation methods based on existing laws and regulations to give legal effect to the substance of international treaties. and 2) Basically the WTO provisions in the Uruguay round that include the principle of non-discrimination require a commitment from every country in international trade transactions to impose a fair system, trade liberalization, removal of barriers, and transparency. Thus, it should be used as guidance for member states to adopt and implement it in their national legislation with broader considerations for the creation of an orderly world trade order as the purpose of international trade law according to GATT and WTO

**Keywords: *Non Discrimination, Import of Used Clothing, and World Trade Organizations.***

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**LEMBAR PERSETUJUAN i**

**LEMBAR PENGESAHAN ii**

**PERNYATAAN ORISINALITAS iii**

**KATA PENGANTAR iv**

**ABSTRAK viii**

**ABSTRACT ix**

**DAFTAR ISI x**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Perumusan Masalah 7
3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 7
4. Kerangka Konseptual 7
5. Landasan Teoritis 8
6. Metode Penelitian 10
7. Sistematika Penulisan 14

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NON DISKRIMINASI, IMPORT PAKAIAN BEKAS, *WORLD TRADE ORGANIZATION***

1. Prinsip Non Diskriminasi 17
2. Import Pakaian Bekas 23
3. *World Trade Organization* ( WTO ) 29

**BAB III TINJAUAN PRINSIP *NON DISKRIMINASI* IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PRESFEKTIF *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)**

1. Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas Dalam Presfektif *World Trade Organizaton (WTO)* 35
2. Penerapan Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas di Indonesia dalam Persfektif *World Trade Organizaton* (WTO) 43

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan 58
2. Saran 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor–impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan atas dasar regulasi yang diterapkan salah satu negara dalam perdagangan antar indvidual dan antar perusahaan yang berada di negara yang berbeda.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan perdagangan internasional mengarah pada bentuk perdagangan yang lebih bebas yang disertai dengan berbagai bentuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral, ini menimbulkan masalah seperti adanya penyelundupan barang. Penyelundupan barang impor ilegal banyak mendapatkan persoalan seperti impor terhadap pakaian bekas ilegal.[[2]](#footnote-2)

Barang impor ilegal ini berupa penyelundupan barang, Penyelundupan barang yang dilakukan melalui jalur laut diminati negara dikarenakan kapasitas muatan barang yang dimiliki melebihi kapasitas muatan barang yang dikirim melalui jalur darat atau jalur udara. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas.

Seperti halnya, Prinsip Non Diskriminasi atau dikenal dengan sebut *Most Favoured Nations* merupakan prinsip dasar hukum WTO. Prinsip ini merupakan komponen dasar dari setiap persetujuan WTO yaitu GATT 1994, GATS (*General Agreement on Trade in Services*) dan TRIPS (*Trade Related of Intelektual Property Rights*), Kedudukan sentral dan WTO didasarkan melalui kesepakatan.[[3]](#footnote-3) Pada mulanya banyak bentuk diskriminasi diaman beberapa Negara memperoleh manfaat dari diskriminasi tersebut karena adanya perlakuan khusus. Namun, dari waktu kewaktu sebagai hasil GATT, kewajiban non diskriminasi atau MFN telah menjadi prinsip utama.

Pada prinsipnya mewajibkan semua Negara anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi diantara produk yang berasal dari Negara anggota WTO lainnya terkait dengan tariff, pajak internal dan peraturan Nasional. Artikel I Ayat 1 GATT yang berjudul “*General Most Favoured Treatment*” menyatakan bahwa:

*With respect to customs duties and change of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the internasional transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any (member) to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other (Members).*

Dapat diartikan bahwa:

Dari artikel I Ayat 1 ini terdapat empat kewajiban dari Negara anggota yang mana bahwa: kewajiban membayar bea cukai atau pungutan-pungutan lain yang akan dikenakan pada barang-barang ekspor-impor, atau bea-bea yang dikenakan pada pembayaran internasional yang berhubungan dengan masalah ekspor-impor, kewajiban yang menyangkut metode pengenaan kewajiban membayar bea cukai dan pungutan lain, kewajiban yang menyangkut segala peraturan dan formalitas ekspor-impor, serta kewajiban yang menyangkut segala masalah yang diatur dalam Artikel III Ayat 2 dan Ayat 4 GATT tentang pajak-pajak dalam negeri.

Negara anggota juga tidak terikat untuk memberikan perlakuan khusus kepada Negara bukan anggota WTO. Perlakuan yang diberikan kepada Negara bukan anggota WTO sangat tergantung pada perjanjian bilateral. Namun demikian, apabila Negara bukan anggota tersebut memperoleh manfaat karenanya, maka manfaat tersebut harus diberikan pula kepada Negara-negara WTO.[[4]](#footnote-4)

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan masyarakat dan dijual kembali. Secara rasio, pakaian bekas impor tidak terlepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual pembeli pun juga harus mengetahui tempat yang dijual sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan pada barang yang dibeli, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Pakaian bekas import sangat diminati oleh masyarakat melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer cukup tinggi, hal ini disebabkan masyarakat yang ingin tampil modis untuk setiap harinya meningkat. Akan tetapi kebutuhan tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan masing-masing individu, otomatis mereka yang ingin tampil bergaya harus membeli barang- barang di bawah harga yang tidak sewajarnya, serta barang-barang bekas yang hanya dipakai sekali atau dua kali dan dijual kembali. Kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa dampaknya antara lain adalah dapat menurunkan daya saing produk dalam negri, mengurangi lapangan pekerjaan, meningkatkan sampah tekstil, dan berpotensi membawa penyakit

Impor pakaian bekas juga berdampak pada perdagangan internasional. Sebagian negara produsen pakaian impor tersebut mungkin merasa dirugikan karena adanya persaingan yang tidak sehat dari barang-barang bekas yang diimpor tersebut. Selain itu, impor pakaian bekas juga dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional karena barang bekas tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk baru yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat dalam mengatur impor pakaian bekas agar tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.[[5]](#footnote-5)

Negara WTO berhak memperoleh perlakuan sama, salah satu Negara yang memiliki kaitan dalam permasalahan impor pakaian bekas ini adalah Malaysia. Menurut Jemmy Kartiwa Sastraatmaja dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 31 Maret 2023 selaku Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa: “Sepanjang tiga tahun ini, Malaysia konsisten berada di posisi tertinggi dalam catatan ekspor pakaian bekas ke Indonesia. Pada 2020, Malaysia mengeskpor sebanyak 22.842 ton. Kemudian 25.323 ton pada 2021, dan 24.544 ton pada 2022”.[[6]](#footnote-6) padahal didalam sektor kepabeanan, Indonesia dan Malaysia telah memiliki kerja sama seperti Patkor Katima yang mana bentuk kerjasama bilateral dalam memberantas tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas atau *balepressed* diperairan Selat Malaka.

Negara Malaysia sangat mudah untuk melakukan Impor Pakaian Bekas ke Indonesia, hal ini terlihat tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap Negara anggota WTO lainnya. Dalam kasus ini Badan Banding (*Appellate Body*) berkaitan dengan penerapan Artikel: 1 menyatakan sebagai berikut:

*The assence of the non-discrimination obligations is that like products should be treated equally, irrespective of their origin. As no participant disputes that all bananas are like products, the non discrimination provision apply to all imports of bananas, irrespective of wheter and how a member categorizes or subdivides these imports for administrative or other reasons.[[7]](#footnote-7)*

Dapat diartikan bahwa Artikel 1 menyatakan bahwa:

Tidak berlaku untuk tindakan-tindakan yang diberikan kepada Negara tertentu dalam bentuk memberikan kesempatan atau peluang yang bersifat lebih atau longgar dibandingkan dengan Negara-negara lain. Tindakan ini sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran.

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 Indoensia mengimpor pakaian bekas dan barang tekstil bekas sebanyak 26,22 ton. Nilai total impornya mencapai USD 272.146 atau sekitar Rp.4,18 miliar (kurs Rp. 15.375 per USD). Sepanjang 2022, nilai impor pakaian bekas terbesar berasal dari Australia, yakni USD 225.941 atau sekitar Rp. 3,5 miliar. Kendali demikian, data-data di atas mengkin belum merepresentasikan fakta secara lengkap bisa jadi ada impor pakaian beksa yang masuk di Indonesia lewat jalur tikus sehingga nilai tidak tercatat.[[8]](#footnote-8) Hal ini didasarkan bahwa ada penerapan Tarif Rate Quota (TRQs) untuk impor raw cotton and serat wol, dan beberapa produk agro. Setiap impor yang melibihi kuantitas itu dibebankan bea yang sangat tinggi, berdasarkan aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

 Dalam hal ini tidak hanya mencangkup diskriminatif secara *de jure* tetapi juga *de facto*. Yang mana dalam tindakan tersebut di permasalahkan karena adanya bea impor yang dilakukan Negara Malaysia terhadap pakaian bekas. Berdasarka latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tentang Penyelundupan Pakaian Bekas dan sebuah skipsi dengan judul ***“Tinjaun Prinsip Non Diskriminasi Impor Pakaian Bekas Dalam Presfektif World Trade Organizaton (WTO)”.***

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas Dalam Persfektif *World Trade Organizaton (WTO)*?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas di Indonesia ?
3. **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Prinsip *Non Diskriminasi Impor* Pakaian Bekas Dalam Presfektif *World Trade Organization* (WTO).
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi kegiatan impor pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pemerintah, sosial, penegakan hukum, dan khususnya dalam prinsip non- diskriminasi impor pakaian bekas dalam presfektif *World Trade Organization* (WTO).
2. Manfaat secara praktis, diharapkan agar para pembaca dapat mengetahui Pengaturan impor pakaian bekas yang ada diindonesia dan dari Peraturan Perundang-undangan, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada khususnya.
3. **Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait:

1. *Non* 7”*Diskriminasi*

Menurut 7”Sefriani, 7”*Non* 7”*Diskriminasi* 7”adalah 7”Prinsip 7”utama 7”yang menjadi 7”dasar 7”GATT 7”adalah 7”prinsip 7”nondiskriminasi. 7”Prinsip 7”*Non* *Diskriminasi* 7”adalah 7”sebuah 7”prinsip 7”yang 7”dilandasi 7”oleh 7”prinsip persamaan kedudukan 7”dalam 7”hukum 7”internasional 7”(*equality*) 7”serta 7”melarang 7”negara memberikan 7”perlakuan 7”yang 7”berbeda 7”(diskriminasi) 7”dalam 7”melakukan aktivitas 7”ekonomi 7”internasionalnya.[[9]](#footnote-9)

1. Impor 7”Pakaian 7”Bekas

Pakaian 7”bekas 7”merupakan 7”barang 7”yang 7”sudah 7”tidak 7”terpakai 7”lagi, barang 7”bekas 7”seringkali 7”dijumpai 7”dari 7”individu. 7”Barang-barang 7”yang sudah tidak 7”terpakai 7”lagi 7”terkadang 7”hanya 7”menumpuk 7”dan 7”seringkali 7”hanya dibuang 7”atau 7”dibakar. 7”Pakaian 7”bekas 7”atau 7”bisa 7”disebut 7”juga 7”dengan “rongsok” 7”dapat 7”dimanfaatkan 7”menjadi 7”barang 7”yang 7”bernilai 7”jual 7”tinggi dan 7”dapat 7”didaur 7”ulang 7”menjadi 7”menjadi 7”produk 7”baru 7”yang 7”memiliki nilai guna 7”baru. 7”Pemanfaatan 7”barang 7”bekas 7”untuk 7”didaur 7”ulang 7”kembali merupakan 7”suatu 7”langkah 7”tepat 7”yang 7”dapat 7”dilakukan 7”untuk 7”menjaga lingkungan, 7”karena 7”dengan 7”melakukan 7”proses 7”daur 7”ulang 7”ini 7”dapat mengurangi 7”pencemaran 7”pada 7”lingkungan. 7”Konsep 7”pengolahan 7”sampah meliputi 7”*Reduce,* 7”*Reuse,* 7”*Recycle.*[[10]](#footnote-10)

1. *World* 7”*Trade* 7”*Organizaton* 7”*(WTO)*

*World* 7”*Trade* 7”*Organization* 7”*(WTO)* 7”saat 7”ini 7”merupakan 7”satu-satunya organisasi 7”internasional 7”yang 7”secara 7”khusus 7”mengurus 7”masalah perdagangan 7”antarnegara 7”di 7”dunia.[[11]](#footnote-11) 7”Organisasi 7”ini 7”secara 7”resmi 7”berdiri pada 7”tanggal 7”1 7”Januari 7”1995, 7”sebagai 7”hasil 7”dari 7”Putaran 7”Uruguay 7”(1986-1994) 7”yang 7”menyepakati 7”*Agreement* 7”*Establishing* 7”*the* 7”*World* 7”*Trade* *Organization.* 7”WTO 7”dibentuk 7”sebagai 7”penerus 7”dan 7”penyempurna 7”*General* *Agreement* 7”*on* 7”*Tariffs* 7”*and* 7”*Trade* 7”*(GATT)* 7”1947. 7”WTO 7”sebagai 7”sebuah organisasi 7”perdagangan 7”internasional 7”diharapkan 7”dapat 7”menjembatani semua 7”kepentingan 7”negara 7”di 7”dunia 7”dalam 7”sektor 7”perdagangan 7”melalui ketentuan-ketentuan 7”yang 7”telah 7”disetujui 7”bersama 7”oleh 7”negara-negara anggota.[[12]](#footnote-12)

1. **Landasan** 7”**Teoritis**
2. **Teori** 7”**Kehendak** 7”**Negara**

Menurut 7”Hegel 7”(Georg 7”Wilhem 7”Friedrich 7”Hegel) 7”George 7”Jellinek, pada 7”dasarnya 7”Negara 7”merupakan 7”sumber 7”segala 7”hukum, 7”dan 7”hukum Internasional 7”itu 7”mengikat 7”karena 7”atas 7”kemauan 7”negara 7”itu 7”sendiri 7”untuk mau 7”tunduk 7”pada 7”Hukum 7”Internasional 7”dan 7”Hukum 7”Internasional 7”itu tidak lain 7”dari 7”pada 7”hukum 7”tata 7”Negara 7”yang 7”mengatur 7”hubungan 7”Luar 7”Negeri suatu 7”Negara 7”(auszeres 7”*staatsrecht*).[[13]](#footnote-13)

1. **Teori** 7”**Hukum** 7”**Alam**

Teori 7”hukum 7”alam 7”(*the* 7”*natural* 7”*right/natural* 7”*law*) 7”dikenalkan pertama 7”kali 7”oleh 7”Aristoteles. 7”Aristoteles 7”membagi 7”sifat 7”hukum 7”ke 7”dalam hukum 7”yang 7”bersifat 7”khusus 7”dan 7”universal. 7”Hukum 7”bersifat 7”khusus 7”yang dimaksud 7”adalah 7”hukum 7”positif, 7”yang 7”dengannya 7”suatu 7”negara 7”tertentu dijalankan. 7”Sementara 7”hukum 7”yang 7”bersifat 7”universal 7”adalah 7”hukum 7”alam, yang 7”dengannya 7”prinsip-prinsip 7”yang 7”tidak 7”tertulis 7”diakui 7”oleh 7”semua umat 7”manusia. 7”Namun, 7”pemikir 7”setelahnya 7”lah 7”yang 7”mengembangkan lebih 7”jauh 7”teori 7”hukum 7”alam 7”ini, 7”seperti 7”Kaum 7”Stoa, 7”Thomas 7”Aquinas, Cicero 7”dan 7”Hugo 7”Grotius. 7”Teori 7”hukum 7”alam 7”seringkali 7”digunakan sebagai 7”landasan 7”moral 7”dan 7”filosofis 7”dalam 7”mengkaji 7”isu 7”tertentu.[[14]](#footnote-14)

1. **Teori** 7”**Kedaulatan** 7”**Negara**

Ajaran 7”filosofis 7”yang 7”paling 7”mengesankan 7”tentang 7”kedaulatan adalah 7”bahwa, 7”kedaulatan 7”merupakan 7”kekuasaan 7”absolut 7”atas 7”suatu wilayah 7”tertentu. 7”Kekuasaan 7”absolut 7”atas 7”wilayah 7”tersebut 7”menjadi 7”dasar bagi 7”pembentukan 7”negara.[[15]](#footnote-15) 7”Pemahaman 7”tentang 7”konsep 7”kedaulatan negara 7”ini 7”sangat 7”membantu 7”dalam 7”mencermati 7”dan 7”mengevaluasi kedudukan 7”negara 7”dalam 7”konteks 7”hubungan 7”internasional 7”yang 7”sangat dinamis.

1. **Metode** 7”**Penelitian**
2. Tipe 7”Penelitian

Tipe 7”Penelitian 7”pada 7”proposal 7”skripsi 7”Yuridis 7”Normatif 7”mengacu kepada 7”norma-norma 7”hukum 7”yang 7”terdapat 7”dalam 7”peraturan 7”perundang undangan 7”dan 7”putusan-putusan 7”pengadilan 7”serta 7”norma-norma 7”hukum 7yang ada 7”dalam 7”masyarakat 7”sehingga 7”berhubungan 7”langsung 7”dengan 7”praktik hukum 7”yang 7”menyangkut 7”dua 7”aspek 7”utama 7”yaitu 7”tentang 7”pembentukan hukum 7”dan 7”penerapan 7”hukum.

Selanjutnya, 7”menurut 7”Bahder 7”Johan 7”Nasution 7”Penelitian 7”ini dilakukan 7”dengan 7”menggunakan 7”tipe 7”penelitian 7”Yuridis 7”Normatif menyatakan 7”bahwa:

Dalam 7”penelitian 7”atau 7”pengkajian 7”ilmu 7”hukum 7”normatif, 7”kegiatan untuk 7”menjelaskan 7”hukum 7”tidak 7”mengenal 7”data 7”atau 7”fakta 7”sosial yang 7”dikenal 7”hanya 7”bahan 7”hukum, 7”jadi 7”untuk 7”menjelaskan 7”hukum atau 7”untuk 7”mencari 7”makna 7”dan 7”memberi 7”nilai 7”akan 7”hukum tersebut hanya 7”digunakan 7”konsep 7”hukum 7”dan 7”langkah-langkah 7”yang ditempuh 7”dalam 7”langkah 7”normatif.[[16]](#footnote-16)

1. Pendekatan 7”yang 7”digunakan

Menurut, 7”Peter 7”Mahmud 7”Marzuki 7”mengatakan 7”bahwa:

Pendekatan 7”perundang-undangan 7”dilakukan 7”dengan 7”menelaah undang-undang 7”dan 7”regulasi 7”yang 7”bersangkut 7”paut 7”dengan 7”ilmu hukum 7”yang 7”ditangani; 7”Pendekatasn 7”kasus 7”dilakukan 7”dengan 7”cara melakukaan 7”telaah 7”terhadap 7”kasus-kasus 7”yang 7”berkaitan 7”dengan 7”isu yang 7”dihadapi 7”yang 7”telah 7”menjadi 7”putusan 7”pengadilan 7”yang 7”telah mempunyai 7”kekuatan 7”yang 7”tetap, 7”dan 7”pendekatan 7”konseptual beranjak 7”dari 7”pandangan-pandangan 7”dan 7”doktrin-doktrin 7”yang berkembang 7”di 7”dalam 7”ilmu 7”hukum.[[17]](#footnote-17)

Dalam 7”penelitian 7”ini, 7”digunakan 7”beberapa 7”pendekatan 7”yaitu: Pendekatan 7”Perundang-undangan 7”(*Statute* 7”*Approach*) 7”yaitu 7”Undang-Undang Nomor 7”17 7”tahun 7”2016 7”tentang 7”Perubahan 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”10 tahun 7”1995 7”tentang 7”Kepabeanan 7”( 7”selanjutnya 7”disebut 7”Undang-Undanf Kepabeanan) 7”pada 7”dictum 7”mengingat 7”salah 7”satunya 7”mencantumkan Undang-Undang 7”Nomor 7”7 7”Tahun 7”1994 7”tentang 7”Pengesahan 7”Agreement Establishing 7”the 7”World 7”Trade 7”Organization 7”( 7”Lembaran 7”Negara 7”Republik Indonesia 7”Tahun 7”1994 7”Nomor 7”57, 7”Tambahan 7”Lembaran 7”Negara 7”Republik Indonesia 7”Nomor 7”3564), 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”7 7”Tahun 7”2014 7”tentang Perdagangan 7”dan 7”dalam 7”Peraturan 7”Mentri 7”Perdagangan 7”Nomor 7”48/M-DAG/PER/7/2015 7”tentang 7”Ketentuan 7”umum 7”dibidang 7”Impor, 7”Pendekatan Konsep 7”(*Conceptual* 7”*Approach*) 7”yang 7”mana 7”dalam 7”proposal 7”ini 7”konsep konsep 7”yang 7”telah 7”dijabarakan 7”dalam 7”proposal 7”ini.selanjutnya, 7”Pendekatan Kasus 7”yang 7”mana 7”berdasarkan 7”berita 7”online 7”maupun 7”fakta 7”lapangan 7”yang terjadi 7”di 7”Indonesia.

1. Pengumpulan 7”Bahan 7”Hukum

Adapun 7”bahan 7”hukum 7”yang 7”digunakan 7”dalam 7”penelitian 7”ini 7”adalah:

1. Bahan 7”Hukum 7”Primer, 7”Bahan 7”hukum 7”primer 7”merupakan 7”bahan 7”hukum yang 7”bersifat 7”autoritatif 7”artinya 7”mempunyai 7”otoritas. 7”Bahan 7”Hukum Sekunder, 7”yaitu 7”bahan 7”hukum 7”yang 7”membantu 7”memahami 7”dan menganalisis 7”bahan 7”hukum 7”primer 7”seperti 7”buku-buku 7”literatur 7”ilmu hukum, 7”Jurnal 7”ilmu 7”hukum, 7”hasil 7”seminar 7”dan 7”workshop 7”yang mempunyai 7”kaitan 7”dengan 7”judul 7”dan 7”masalah 7”yang 7”dibahas 7”dalam penelitian 7”ini, 7”seperti 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”17 7”tahun 7”2016 7”tentang Perubahan 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”10 7”tahun 7”1995 7”tentang 7”Kepabeanan (”selanjutnya 7”disebut 7”Undang-Undanf 7”Kepabeanan) 7”pada 7”dictum mengingat 7”salah 7”satunya 7”mencantumkan 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”7 Tahun 7”1994 7”tentang 7”Pengesahan 7”Agreement 7”Establishing 7”the 7”World Trade 7”Organization 7”( 7”Lembaran 7”Negara 7”Republik 7”Indonesia 7”Tahun 1994 7”Nomor 7”57, 7”Tambahan 7”Lembaran 7”Negara 7”Republik 7”Indonesia Nomor 7”3564), 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”7 7”Tahun 7”2014 7”tentang Perdagangan 7”dan 7”dalam 7”Peraturan 7”Mentri 7”Perdagangan 7”Nomor 7”48/M-DAG/PER/7/2015 7”tentang 7”Ketentuan 7”umum 7”dibidang 7”Impor.
2. Bahan 7”Hukum 7”Tersier, 7”yaitu 7”bahan 7”hukum 7”yang 7”memberi 7”petunjuk berupa 7”kamus 7”hukum, 7”ensiklopedia 7”dan 7”website 7”yang 7”relevan 7”dengan judul 7”dan 7”masalah 7”yang 7”dibahas 7”dalam 7”penelitian 7”ini.

Adapun 7”teknik 7”pengumpulan 7”bahan 7”hukum 7”yang 7”dipergunakan 7”dalam 7”penelitian 7”ini 7”adalah 7”melalui 7”studi 7”kepustakaan.Bahan 7”hukum 7”yang 7”diperoleh 7”melalui 7”penelitian 7”kepustakaan 7”pertama-tama 7”dilakukan 7”pemahaman 7”dan 7”mengkaji 7”isinya 7”secara 7”mendalam 7”untuk 7”selanjutnya 7”dibuat 7”catatan 7”sesuai 7”permasalahan 7”yang 7”dikaji.

Bahan 7”hukum 7”yang 7”relevan 7”dikumpulkan 7”menggunakan 7”teknik 7”Sistem 7”Kartu 7”(*Card* 7”*System*), 7”yaitu 7”menelaah 7”peraturan-peraturan 7”yang 7”relevan, 7”buku-buku 7”atau 7”bahan-bahan 7”bacaan, 7”karya 7”ilmiah 7”para 7”sarjana 7”dan 7”hasilnya 7”dicatat 7”dengan 7”system 7”kartu 7”hal 7”ini 7”dilakukan 7”agar 7”lebih 7”memudahkan 7”dalam 7”penguraian, 7”menganalisa 7”dan 7”menyimpulkan 7”konsep 7”yang 7”ada.

1. **Sistematika** 7”**Penulisan**

 Sistematika 7”penulisan 7”memuat 7”rencana 7”pembahasan 7”dalam 7”tesis. 7”Dengan 7”ini 7”diharapkan 7”tergambar 7”sistematika 7”penulisannya 7”dari 7”mulai 7”bab 7”pendahuluan 7”hingga 7”penutup, 7”rencana 7”susunan 7”tesis 7”yang 7”akan 7”dilakukan 7”adalah 7”sebagai 7”berikut:

**BAB** 7”**I** 7”: 7” **PENDAHULUAN**

Pada 7”bab 7”ini 7”terdiri 7”dari 7”latar 7”belakang 7”masalah, perumusan masalah, 7”tujuan 7”penelitian, 7”manfaat penelitian, 7”kerangka konseptual, 7”landasan 7”teoretis, metode 7”penelitian 7”yang 7”diakhiri dengan 7”sistematika penulisan.

**BAB** 7”**II** 7”: 7” **TINJAUAN** 7”**PUSTAKA** 7”**TENTANG** 7”**NON** **DISKRIMINASI,** **IMPOR** 7”**PAKAIAN** 7”**BEKAS,** ***WORLD*** 7”***TRADE*** ***ORGANIZATION*** 7”**(WTO).**

Pada 7”bab 7”ini, 7”membahas 7”mengenai 7”konsep 7”pemikiran 7”tentang, Prinsip 7”Non 7”Diskriminati, 7”Impor 7”Pakaian 7”Bekas, 7”dan 7”*World* *Trade* 7”*Organizatian* 7”(WTO). 7”

**BAB** 7”**III** 7”: 7” **PEMBAHASAN** 7”**TENTANG** 7”**PENERAPAN** 7”**PRINSIP** ***NON*** ***DISKRIMINASI*** 7”**TERHADAP** 7”**IMPOR** **PAKAIAN** 7”**BEKAS** **KE** 7”**INDONESIA** 7”**DALAM** **PRESFEKTIF** 7”***WORLD*** 7”***TRADE*** ***ORGANIZATION*** **(WTO).**

Pada 7”bab 7”pembahasan 7”ini, 7”dibahas 7”mengenai 7”Prinsip Non Diskriminasi 7”terhadap 7”Import 7”Pakaian 7”Bekas 7”Ke Indonesia serta mengenai 7”kegiatan 7”Import 7”Pakaian Bekas diperbolehkankan dalam 7”Peraturan 7”Perundang Undangan Indonesia.

**BAB** 7”**IV** 7”: **PENUTUP**

Pada 7”bab 7”Penutup 7”ini 7”besisikan 7”bagian 7”akhir 7”dari penulisan 7”yang 7”terdiri 7”dari 7”kesimpulan 7”dan 7”saran. Kesimpulan 7”yang 7”dibuat 7”merupakan 7”jawaban 7”singkat terhadap 7”permasalahan 7”yang 7”telah 7”dirumuskan 7”pada Bab I, 7”sedangkan 7”saran 7”merupakan 7”sumbangan 7”pemikiran terhadap 7”permasalahan 7”yang 7”telah 7”dibahas 7”pada 7”Bab III. Saran 7”ini 7”diharapkan 7”dapat 7”menjadi 7”masukan 7”dalam pengembangan 7”ilmu 7”pengetahuan 7”hukum.

**BAB** 7”**II**

**TINJAUAN** 7”**PUSTAKA** 7”**TENTANG** 7”

**NON** 7”**DISKRIMINASI,** 7”**IMPOR** 7”**BARANG,** 7”**DAN** 7”***WORLD*** 7”***TRADE*** 7”***ORGANIZATION*** 7”**(WTO)**

1. ***Non*** 7”***Diskriminasi***

Prinsip 7”utama 7”yang 7”menjadi 7”dasar 7”GATT 7”adalah 7”prinsip 7”nondiskriminasi. 7”Prinsip 7”ini 7”dilandasi 7”oleh 7”prinsip 7”persamaan 7”kedudukan 7”dalam 7”hukum 7”internasional 7”*equality*. 7”Prinsip 7”ini 7”melarang 7”negara 7”memberikan 7”perlakuan 7”yang 7”berbeda 7”(diskriminasi) 7”dalam 7”melakukan 7”aktivitas 7”ekonomi 7”internasionalnya.[[18]](#footnote-18) 7”Prinsip 7”non-diskriminasi 7”ini 7”dapat 7”dibedakan 7”menjadi 7”dua, 7”yaitu 7”*Prinsip* 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”*dan* 7”*Prinsip* 7”*National* 7”*Treatment.*

1. *Prinsip* 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation*

Prinsip 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”yang 7”selanjutnya 7”disebut 7”dengan prinsip 7”MFN 7”merupakn 7”prinsip 7”yang 7”terpenting 7”dalam 7”hukum 7”ekonomi internasional.[[19]](#footnote-19) 7”Secara 7”ringkas 7”MFN 7”adalah 7”prinsip 7”perdagangan internasional 7”antar 7”negara 7”anggota 7”harus 7”dilakukan 7”secara 7”non-diskriminasi. 7”Prinsip 7”ini 7”mensyaratkan 7”bagi 7”suatu 7”negara 7”pemerintah untuk tidak 7”memberikan 7”perlakuan 7”diskriminasi 7”antara 7”jasa 7”dan 7”pemberi 7”jasa dari 7”negara-negara 7”lainnya. 7”Setiap 7”tindakan 7”yang 7”mendiskriminasikan 7”antara 7”jasa 7”dan 7”pemasok 7”jasa 7”suatu 7”negara 7”dengan 7”jasa-jasa 7”dan 7”pemasok 7”jasa 7”dari 7”negara 7”anggota 7”lainnya 7”bertentangan 7”dengan 7”persetujuan 7”*General* 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Trade* 7”*in* 7”*Service* 7”(GATs). 7”Konsekuensi 7”dianutnya 7”prinsip 7”ini 7”oleh 7”GATs 7”adalah 7”setiap 7”negara 7”anggota 7”yang 7”menimbulkan 7”diskriminasi 7”terhadap 7”sesama 7”pemasok 7”jasa 7”asing, 7”bertentangan 7”dengan 7”GATs 7”kecuali 7”telah 7”diajukan 7”pengecualian 7”sementara 7”terhadap 7”penetapan 7”prinsip 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”(MFN). 7”Pendek 7”kata, 7”semua 7”negara 7”harus 7”diperlakukan 7”atas 7”dasar 7”yang 7”sama 7”dan 7”semua 7”negara 7”menikmati 7”keuntungan 7”dari 7”suatu 7”kebijkasanaan 7”perdagangan.[[20]](#footnote-20) 7”Dalam 7”pelaksanaannya 7”prinsip 7”ini 7”mendapat 7”pengecualiannya, 7”khusus 7”dalam 7”menyangkut 7”kepentingan 7”negara 7”sedang 7”berkembang.

Terhadap 7”penerapan 7”prinsip 7”Most 7”Favoured 7”Nation 7”terdapat 7”pengecualiannya 7”yang 7”diatur 7”dalam 7”Pasal 7”II 7”ayat 7”2 7”*General* 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Trade* 7”*in* 7”*Service* 7”*(GATs)* 7”yang 7”bunyinya 7”*“A* 7”*member* 7”*may* 7”*maintain* 7”*a* 7”*measure* 7”*inconsistent* 7”*with* 7”*paraghraph* 7”*1* 7”*provided* 7”*that* 7”*such* 7”*a* 7”*measure* 7”*is* 7”*listed* 7”*in,* 7”*and* 7”*meets* 7”*the* 7”*conditions* 7”*of,* 7”*the* 7”*Annex* 7”*on* 7”*Article* 7”*II* 7”*Exemptions”*.[[21]](#footnote-21) 7”Berdasarkan 7”Pasal 7”II 7”GATs 7”terdapat 7”kewajiban 7”dan 7”disiplin 7”yang 7”diperlakukan 7”bagi 7”negara 7”anggota, 7”adapun 7”kewajiban 7”umum 7”dan 7”disiplin 7”tersebut, 7”adalah 7”sebagai 7”berikut:

1. Negara 7”peserta, 7”berkenaan 7”dengan 7”setiap 7”kebijakan 7”yang 7”diambil 7”berkenaan 7”dengan 7”pelaksanaan 7”GATs, 7”harus 7”segara 7”dengan 7”dan 7”tanpa 7”syarat 7”memberikan 7”perlakuan 7”yang 7”tidak 7”berbeda 7”atau 7”*no* 7”*less* 7”*favourable* 7”kepada 7”jasa 7”dan 7”pemasok 7”jasa 7”dari 7”negara 7”lain 7”sebagaimana 7”perlakuan 7”yang 7”diberikan 7”kepada 7”pemasok 7”jasa 7”dari 7”negara 7”lainnya.
2. Negara 7”peserta 7”dibolehkan 7”menerapkan 7”kebijakan 7”yang 7”tidak 7”sesuai 7”dengan 7”kebijakan 7”sebagaimana 7”dimaksud 7”pada 7”para 7”pihak 7”dengan 7”syarat 7”kebijakan 7”tersebut 7”dicantumkan 7”dan 7”memenuhi 7”persyaratan 7”sebagaimana 7”dimaksud 7”dalam 7”Annex 7”Pasal 7”II: 7”exemptions.
3. Ketentuan 7”dalam 7”perjanjian 7”ini 7”tidak 7”dimaksudkan 7”untuk 7”melarang 7”suatu 7”negara 7”peserta 7”memberikan 7”kemudahan 7”kepada 7”negara 7”yang 7”berbatasan 7”wilayah.[[22]](#footnote-22)

Dari 7”ketentuan 7”Pasal 7”II 7”ayat 7”1 7”GATs 7”yaitu 7”tentang 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”*Clause* 7”dapat 7”dikatakan 7”bahwa 7”GATs 7”memberikan 7”kebebasan 7”bagi 7”anggotanya 7”untuk 7”melakukan 7”pengecualian 7”dari 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”*Clause*. 7”Suatu 7”negara 7”anggota 7”dapat 7”memberikan 7”perlakuan 7”yang 7”lebih 7”baik 7”atas 7”suatu 7”sektor 7”jasa 7”kepada 7”satu 7”atau 7”beberapa 7”negara 7”anggota, 7”akan 7”tetapi 7”tidak 7”diperkenankan 7”untuk 7”memberikan 7”perlakuan 7”yang 7”lebih 7”buruk 7”dari 7”yang 7”dicantumkan 7”dalam 7”*Schedule* 7”*of* 7”*Commitments* 7”(SoC) 7”kepada 7”satu 7”atau 7”beberapa 7”negara 7”anggota.

Prinsip 7”MFN 7”menetapkan 7”bawa 7”setiap 7”anggota 7”harus 7”dengan 7”segera 7”(immedietly) 7”dam 7”tanpa 7”syarat 7”(unconditional) 7”memberikan 7”perlakuan 7”yang 7”tidak 7”lebih 7”buruk 7”atau 7”*no* 7”*less* 7”*favourable* 7”kepada 7”anggota 7”lain.[[23]](#footnote-23) 7”sebagai 7”contoh 7”izin 7”yang 7”diberikan 7”kepada 7”suatu 7”bank 7”asing 7”untuk 7”beroperasi 7”dalam 7”suatu 7”wilayah 7”anggota 7”GATs, 7”maka 7”dengan 7”segera 7”dan 7”tanpa 7”syarat 7”izin 7”harus 7”diberikan 7”pula 7”kepada 7”anggota 7”GATs 7”lainnya. 7”Konsekuensi 7”dari 7”dianutnya 7”sistem 7”MFN 7”sebagaimana 7”disebutkan 7”diatas 7”adalah 7”setiap 7”tindakan 7”negara 7”anggota 7”yang 7”menimbulkan 7”diskriminasi 7”terhadap 7”semua 7”pemasok 7”barang 7”atau 7”jasa 7”adalah 7”bertentangan 7”dengan 7”GATs.

Meskipun 7”prinsip 7”MFN 7”masuk 7”dalam 7”kategori 7”kewajiban 7”umum, 7”yaitu 7”kewajiban 7”yang 7”diberlakukan 7”terhadap 7”semua 7”sektor 7”perdagangan 7”barang 7”dan 7”jasa 7”terhadap 7”semua 7”negara 7”anggota, 7”namun 7”dalam 7”pengaturan 7”lebih 7”lanjut 7”diberikan 7”kemungkinan 7”bagi 7”negara 7”negara 7”anggota 7”untuk 7”melakukan 7”penyimpangan 7”atau 7”pengecualian 7”terhadap 7”prinsip 7”ini. 7”Hal 7”ini 7”dapat 7”dilihat 7”dalam 7”Pasal 7”II 7”GATs 7”anggota 7”dapat 7”mempertahankan 7”tindakan 7”yang 7”tidak 7”sesuai 7”dengan 7”prinsip 7”MFN. 7”Selama 7”prinsip 7”ini 7”terdaftar 7”dalam 7”daftar 7”pengecualian 7”dan 7”memenuhi 7”persyaratan 7”seperti 7”tersebut 7”dalam 7”lampiran 7”tentang 7”pengecualian 7”terhadap 7”Pasal 7”II.

Sebagai 7”contoh 7”dalam 7”MFN 7”exemption 7”yang 7”diajukan 7”Indonesia 7”dalam 7”dokumen 7”GATS/E/43. 7”April 7”1994. 7”Indonesia 7”telah 7”mengecualikan 7”penerapan 7”prinsip 7”MFN 7”dalam 7”perdagangan 7”jasa 7”perbankan, 7”jasa 7”pekerjaan 7”ahli 7”madya 7”(semi 7”skilled 7”workers) 7”dan 7”jasa 7”kontruksi. 7”[[24]](#footnote-24)

1. Prinsip 7”*National* 7”*Treatment*.

Apabila 7”prinsip 7”MFN 7”melarang 7”negara 7”memberikan 7”perlakuan berbeda 7”antara 7”negara 7”asing 7”yang 7”satu 7”dengan 7”negara 7”yang 7”lain, 7”maka Prinsip 7”National 7”Treatment 7”melarang 7”negara 7”meberikan 7”perlakuan 7”berbeda antara 7”perusahaan 7”nasional 7”atau 7”produk 7”asing. 7”Prinsip 7”ini 7”terdapat 7”dalam Pasal 7”XVII 7”GATs. 7”Tujuan 7”dari 7”prinsip 7”ini 7”adalah 7”untuk 7”menciptakan harmonisasi 7”perdagangan 7”agar 7”tidak 7”terjadi 7”perlakuan 7”yang 7”diskriminatif. Dalam 7”prinsip 7”ini 7”terdapat 7”konsep 7”liberal 7”yang 7”membatasi 7”campur 7”tangan pemerintah 7”dalam 7”pasar 7”perdagangan 7”domestik 7”agar 7”semua 7”produk 7”yang beredar 7”dapat 7”bersaing 7”dengan 7”wajar 7”dan 7”bebas 7”hambatan. 7”[[25]](#footnote-25)

Prinsip 7”National 7”treatment 7”mensyaratkan 7”bahwa 7”setiap 7”negara anggota 7”untuk 7”memperlakukan 7”jasa-jasa 7”dan 7”pemberi 7”jasa 7”dari 7”negara-negara 7”anggota 7”lainnya 7”harus 7”sama 7”dengan 7”perlakuan 7”yang 7”diberikan terhadap 7”jasa 7”atau 7”pemberi 7”jasa 7”dari 7”negaranya. 7”Perlakuan 7”terhadap 7”jasa dan 7”pemberi 7”jasa 7”ini 7”wajib 7”berlaku 7”pada 7”sektor-sektor 7”yang 7”tercantum dalam 7”*Schedule* 7”*of* 7”*Commitment* 7”(SoC) 7”beserta 7”persyaratan-persyaratannya. Karena 7”itu 7”setiap 7”negara 7”anggota 7”dapat 7”mendaftarkan 7”sejumlah persyaratan dan 7”kualifikasi 7”terhadap 7”penerapan 7”prinsip 7”*National* 7”*Treatment* 7”dan mencantumkannya 7”di 7”dalam 7”daftar 7”komitmen 7”nasional. 7”Negara 7”anggota lain 7”hanya 7”dapat 7”menuntut 7”perlakuan 7”nasional 7”(National 7”Treatment) 7”dari satu 7”negara 7”sesuai 7”dengan 7”yang 7”tercantum 7”dalam 7”daftar 7”komitmen 7”negara tersebut.

“Setiap 7”negara 7”peserta, 7”berkenaan 7”dengan 7”sektor 7”maupun 7”sub sektor 7”yang 7”dinyatakan 7”dalam 7”*Schedule* 7”*of* 7”*Commitment* 7”dan 7”tunduk 7”pada semua 7”kondisi 7”dan 7”kualifikasi 7”yang 7”etercantum 7”di 7”dalamnya, 7”harus memberikan 7”perlakuan 7”yang 7”tidak 7”berbeda 7”terhadap 7”jasa 7”dan 7”pemasok jasa 7”dari 7”negara 7”lain 7”sebagaimana 7”perlakuan 7”yang 7”ia 7”berikan 7”kepada 7”jasa dan 7”pemasok 7”jasa 7”domestik 7”negara 7”tersebut. ”Pemberlakuan 7”prinsip National 7”Treatment 7”dalam 7”GATs 7”berbeda 7”dengan 7”pemberlakuan 7”di GATT, karena 7”di 7”dalam 7”ketentuan 7”GATs 7”pemberlakuan 7”prinsip 7”*National* *Treatment* 7”hanya 7”terbatas 7”dan 7”tidak 7”berlaku 7”umum. 7”

Di 7”dalam 7”GATs prinsip 7”*National* 7”*Treatment* 7”hanya 7”berlaku 7”bagi 7”negara-negara 7”anggota *World* 7”*Trade* 7”*Organization* 7”(WTO) 7”yang 7”telah 7”mendaftarkan 7”komitmen spesifik 7”terhadap 7”sektor 7”jasa 7”yang 7”dipilihnya.Dua 7”kumpulan 7”kewajiban yang 7”terdapat 7”dalam 7”GATs 7”yakni 7”pertama 7”kumpulan 7”tentang 7”konsep, prinsip 7”dan 7”aturan 7”yang 7”menciptakan 7”kewajiban 7”yang 7”berlaku 7”bagi seluruh measures 7”yang 7”mempengaruhi 7”perdagangan 7”jasa. 7”Kedua 7”kumpulan kumpulan 7”tentang 7”kewajiban 7”khusus 7”hasil 7”negosiasi 7”yang 7”merupakan komitmen 7”yang 7”berlaku 7”untuk 7”sektor 7”jasa 7”dan 7”subsektor 7”yang 7”terdaftar dalam 7”*schedules* 7”*of* 7”*Commitment* 7”(SoC) 7”negara 7”anggota.[[26]](#footnote-26)

1. **Import** 7”**Pakaian** 7”**Bekas**
2. **Pengertian** 7”**Import** 7”**Pakaian** 7”**Bekas** 7”

Impor 7”adalah 7”kegiatan 7”memasukkan 7”barang 7”ke 7”dalam 7”daerah pabean. 7”Transaksi 7”impor 7”adalah 7”perdagangan 7”dengan 7”cara 7”memasukkan barang 7”dari 7”luar 7”negeri 7”ke 7”dalam 7”daerah 7”pabean 7”Indonesia 7”dengan mematuhi 7”ketentuan 7”peraturan 7”perudang-undangan 7”yang 7”berlaku.[[27]](#footnote-27) Menurut Susilo 7”impor 7”bisa 7”diartikan 7”sebagai 7”“kegiatan 7”memasukkan 7”barang 7”dari suatu 7”negara 7”(luar 7”negeri) 7”ke 7”dalam 7”wilayah 7”pabean 7”negara 7”lain”.[[28]](#footnote-28) Pengertian 7”ini 7”memiliki 7”arti 7”bahwa 7”kegiatan 7”impor 7”berarti 7”melibatkan dua negara. 7”Dalam 7”hal 7”ini 7”bisa 7”diwakili 7”oleh 7”kepentingan 7”dua 7”perusahaan antar 7”dua 7”negara 7”tersebut, 7”yang 7”berbeda 7”dan 7”pastinya 7”juga 7”peraturan serta bertindak 7”sebagai 7”supplier 7”dan 7”satunya 7”bertindak 7”sebagai 7”negara penerima. Impor 7”adalah 7”membeli 7”barang-barang 7”dari 7”luar 7”negeri 7”sesuai 7”dengan ketentuan 7”pemerintah 7”yang 7”dibayar 7”dengan 7”menggunakan 7”valuta 7”asing.[[29]](#footnote-29)

Dasar 7”hukum 7”peraturan 7”mengenai 7”Tatalaksana 7”Impor 7”diatur 7”dalam Keputusan 7”Direktur 7”Jendral 7”Bea 7”dan 7”Cukai 7”Nomor 7”KEP-07/BC/2003. Tentang 7”petunjuk 7”pelaksanaan 7”Tatalaksana 7”Kepabeanan 7”di 7”bidang 7”impor dan 7”Keputusan 7”Menteri 7”Keuangan 7”Nomor 7”453/KMK.04/2002 7”tentang Tatalaksana 7”Kepabeanan 7”di 7”bidang 7”impor. 7”Komoditi 7”yang 7”dimasukkan 7”ke dalam 7”peredaran 7”bebas 7”di 7”dalam 7”wilayah 7”pabean 7”(dalam 7”negeri), 7”yang dibawa 7”dari 7”luar 7”wilayah 7”pabean 7”(luar 7”negeri) 7”dikenakan 7”bea 7”masuk kecuali 7”dibebaskan 7”atau 7”diberikan 7”pembebasan. 7”Dengan 7”kata 7”lain seseorang 7”atau 7”badan 7”usaha 7”yang 7”ditetapkan 7”sebagai 7”importir 7”wajib membayar 7”bea 7”masuk 7”dan 7”pajak 7”sebagaimana 7”yang 7”telah 7”ditetapkan pemerintah.[[30]](#footnote-30) 7”Sehingga 7”dapat 7”disimpulkan 7”bahwa 7”impor 7”yaitu 7”kegiatan perdagangan 7”internasional 7”dengan 7”cara 7”memasukkan 7”barang 7”ke 7”wilayah pabean 7”Indonesia 7”yang 7”dilakukan 7”oleh 7”perorangan 7”atau 7”perusahaan 7”yang bergerak 7”dibidang 7”ekspor 7”impor 7”dengan 7”mematuhi 7”ketentuan 7”peraturan perundangundangan 7”yang 7”berlaku 7”yang 7”dikenakan 7”bea 7”masuk.

1. **Prosedur** 7”**Impor** 7”**dan** 7”**Tata** 7”**Pelaksanaan** 7”**Impor**

Pada 7”dasarnya 7”prosedur 7”impor 7”sebagai 7”berikut:

1. Importir 7”dalam 7”negeri 7”dan 7”supplier 7”dari 7”luar 7”negeri 7”mengadakan 7”korespondensi 7”dan 7”tawar-menawar 7”harga 7”yang 7”akan 7”di 7”impor;
2. Jika 7”sudah 7”terjadi 7”kesepakatan 7”antara 7”kedua 7”belah 7”pihak, 7”maka 7”dibuat 7”perjanjian 7”jual-beli 7”(sales 7”contract);
3. Importir 7”membuka 7”LC 7”ke 7”Bank 7”Devisa 7”dalam 7”negeri;
4. Bank 7”Devisa 7”dalam 7”Negeri 7”memberitahukan 7”kepada 7”Bank 7”Korespondensi 7”Luar 7”Negeri 7”tentang 7”pembukaan 7”LC 7”nya;
5. Koresponden 7”Luar 7”Negeri 7”menghubungi 7”Eksportir 7”Luar 7”Negeri;
6. Eksportir 7”Luar 7”Negeri 7”pesan 7”tempat 7”(ruangan) 7”ke 7”agen-agen 7”pelayaran, 7”dengan 7”maksud 7”agar 7”dapat 7”dimuat-dikirim;
7. Eksportir 7”menyerahkan 7”Invoice, 7”Packing 7”List 7”lembar 7”asli 7”kepada 7”Bank 7”Luar 7”Negeri 7”dan 7”menarik 7”weselnya 7”sedangkan 7”duplikat 7”dokumen-dokumen 7”di 7”atas 7”dikirim 7”langsung 7”kepada 7”importer;
8. Bank 7”Luar 7”Negeri 7”mengirim 7”dokumen 7”kepada 7”Bank 7”Devisa 7”dalam 7”negeri;
9. Bank 7”Devisa 7”dalam 7”negeri 7”menyerahkan 7”dokumen-dokumen 7”asli 7”kepada 7”importer;
10. Importir 7”menyerahkan 7”dokumen-dokumen 7”surat 7”kuasa 7”ke 7”EMKL;
11. EMKL 7”menukar 7”konosemen 7”asli 7”dengan 7”DO 7”kepada 7”agen 7”perkapalan 7”dan 7”Membuat 7”PPUD 7”berdasarkan 7”dokumen, 7”serta 7”membayar 7”bea 7”masuk 7”PPN 7”importir 7”dll;
12. Barang 7”keluar 7”ke 7”peredaran 7”bebas/diserahkan 7”kepada 7”importir.[[31]](#footnote-31)

Kepabeanan 7”adalah 7”segala 7”sesuatu 7”yang 7”berhubungan 7”dengan pengawasan 7”atau 7”lalu 7”lintas 7”barang 7”yang 7”masuk 7”atau 7”keluar 7”daerah 7 pabean dan 7”pemungutan 7”bea 7”masuk 7”(UU.No.10/95). 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”10 Tahun 7”1995 7”tentang 7”Kepabeanan, 7”sebagaimana 7”telah 7”diubah 7”dengan Undang-Undang 7”Nomor 7”17 7”Tahun 7”2006 7”Kep. 7”Menkeu 7”No. 7”453/KMK 04/2002 7”tentang 7”Tatalaksana 7”Kepabeanan 7”di 7”Bidang 7”Impor, 7”sebagaimana telah 7”beberapa 7”kali 7”diubah 7”terakhir 7”dengan 7”Kep. 7”Menkeu 7”No.112/KMK 04/2003. 7”Kep. 7”DJBC 7”No. 7”KEP-07/BC/2003 7”tentang 7”Petunjuk 7”Pelaksanaan Tatalaksana 7”Kepabeanan 7”di 7”Bidang 7”Impor 7”yang 7”telah 7”beberapa 7”kali 7”di ubah terakhir 7”dengan 7”peraturan 7”DJBC 7”No.112/mk 7”04/2003.[[32]](#footnote-32)

1. Daerah 7”pabean 7”adalah 7”wilayah 7”Republik 7”Indonesia 7”yang 7”meliputi wilayah 7”daratan, 7”perairan, 7”dan 7”ruang 7”udara 7”di 7”atasnya 7”serta 7”tempat-tempat 7”tertentu 7”di 7”Zona 7”Ekonomi 7”Eksklusif 7”dan 7”landasan 7”kontinen yang di dalamnya”berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 7 tentang Kepabeanan;
2. Kawasan 7”pabean 7”adalah 7”kawasan 7”dengan 7”batas-batas 7”tertentu 7”di pelabuhan 7”laut, 7”bandar 7”udara 7”atau 7”tempat 7”lain 7”yang 7”ditetapkan 7”untuk lalu 7”lintas 7”barang 7”yang 7”sepenuhnya 7”berada 7”di 7”bawah 7”pengawasan Direktorat 7”Jendral 7”Bea 7”dan 7”Cukai;
3. Impor 7”untuk 7”dipakai
4. Memasukkan 7”barang 7”ke 7”dalam 7”daerah 7”pabean 7”dengan 7”tujuan 7”untuk dipakai 7”oleh 7”orang 7”yang 7”berdomisili 7”di 7”Indonesia;
5. Memasukan 7”barang 7”ke 7”dalam 7”daerah 7”pabean 7”untuk 7”dimiliki 7”atau dikuasai 7”oleh 7”orang 7”yang 7”berdomisili 7”di 7”Indonesia.
6. Pengeluaran 7”barang 7”impor 7”untuk 7”dipakai 7”setelah:
7. Diserahkan 7”pemberitahuan 7”pabean 7”dan 7”dilunasi 7”bea 7”masuk 7”dan PDRI;
8. Diserahkan 7”pemberitahuan 7”pabean 7”dan 7”jaminan;
9. Diserahkan 7”dokumen 7”pelengkap 7”pabean 7”dan 7”jaminan.

5). 7”Penjaluran 7”dan 7”Kriteria 7”Penjaluran

Barang 7”impor 7”yang 7”telah 7”diajukan 7”PIB 7”dilakukan 7”pemeriksaan pabean 7”secara 7”selektif, 7”dalam 7”rangka 7”pemeriksaan 7”pabean 7”secara 7”selektif inilah 7”ditetapkan 7”jalur 7”pengeluaran 7”barang, 7”yaitu:

1. Jalur 7”merah

Jalur 7”merah 7”adalah 7”proses 7”pelayanan 7”dan 7”pengawasan pengeluaran 7”barang 7”impor 7”dengan 7”dilakukan 7”pemeriksaan 7”fisik, 7”dan dilakukan 7”penelitian 7”dokumen 7”sebelum 7”diterbitkannya 7”Surat Persetujuan 7”Pengeluaran 7”Barang 7”(SPPB). 7”Berikut 7”adalah 7”kriteria 7”jalur merah:

1. Importir 7”baru 7”adalah 7”orang 7”atau 7”perusahaan 7”yang 7”memasukkan barang-barang 7”dari 7”luar 7”negeri 7”atau 7”mengimpor 7”barang 7”untuk pertama 7”kalinya.
2. Importir 7”yang 7”termasuk 7”dalam 7”kategori 7”risiko 7”tinggi 7”adalah importir 7”yang 7”tingkat 7”pelanggarannya 7”tinggi 7”atau 7”importir 7”yang telah 7”banyak 7”melakukan 7”pelanggaran 7”ketentuan 7”pabean;
3. Barang 7”impor 7”sementara 7”adalah 7”barang 7”yang 7”di 7”impor 7”untuk sementara 7”waktu 7”yang 7”selanjutnya 7”akan 7”diekspor 7”kembali;
4. Barang 7”re-impor 7”adalah 7”barang 7”ekspor 7”yang 7”karena 7”sebab 7”tertentu diimpor 7”kembali;
5. Pemberitahuan 7”pabean

Pada 7”pemberitahuan 7”ini 7”dokumen 7”pelengkap 7”pabean 7”antara 7”lain:

1. PIB 7”adalah 7”pemberitahuan 7”pabean 7”untuk 7”pengeluaran 7”barang yang 7”diimpor 7”untuk 7”dipakai;
2. *Invoice* 7”adalah 7”daftar 7”barang 7”kiriman 7”yang 7”dilengkapi 7”dengan nama, 7”jumlah 7”dan 7”harga 7”yang 7”harus 7”dibayar 7”oleh 7”pembeli;
3. *Packing* 7”*List* 7”adalah 7”dokumen 7”yang 7”menerangkan 7”tentang 7”jenis, jumlah, 7”berat 7”dan 7”volume 7”barang/komoditi 7”dalam 7”perdagangan internasional;
4. *Bill* 7”*of* 7”*Lading* 7”adalah 7”dokumen 7”perjalanan 7”barang 7”melalui laut/dokumen 7”pengapalan 7”yang 7”menyatakan 7”bukti 7”penerimaan barang 7”bukti 7”kepemilikan 7”barang 7”dan 7”bukti 7”adanya kontrak/perjanjian 7”pengangkutan;
5. Polis 7”Asuransi 7”adalah 7”suatu 7”perjanjian 7”asuransi 7”ataupun pertanggungan 7”untuk 7”melindungi 7”barang 7”dari 7”berbagai 7”macam resiko;
6. Surat 7”Setoran 7”Pabean 7”Cukai 7”Pajak 7”(SSPCP) 7”adalah 7”formulir yang 7”digunakan 7”oleh 7”wajib 7”pajak 7”untuk 7”melakukan 7”penyetoran pungutan 7”serta 7”pajak-pajak 7”dalam 7”rangka 7”impor 7”seperti 7”cukai, bea 7”masuk, 7”PPN/PPn-BM, 7”PPh 7”pasal 7”22 7”impor;
7. Surat 7”Kuasa 7”adalah 7”sebuah 7”surat 7”yang 7”menyatakan 7”pemberian wewenang 7”untuk 7”melakukan 7”sebuah 7”kegiatan 7”dari 7”pemberi ”kuasa 7kepada 7”penerima 7”kuasa 7”yang 7”keduanya 7”menyertakan 7”bukti 7”sah dengan 7”pernyataan 7”disetai 7”materai 7”atau 7”tanda 7”tangan 7”sebagai bukti.[[33]](#footnote-33)
8. Jalur 7”Hijau

Jalur 7”hijau 7”adalah 7”proses 7”pelayanan 7”dan 7”pengawasan pengeluaran 7”barang 7”impor 7”dengan 7”tidak 7”dilakukan 7”pemeriksaan 7”fisik, tetapi 7”dilakukan 7”penelitian 7”dokumen 7”setelah 7”diterbitkannya 7”Surat Persetujuan 7”Pengeluaran 7”Barang 7”(SPPB). 7”Jalur 7”hijau 7”memiliki 7”kriteria yang 7”,mana 7”Importir 7”yang 7”berisiko 7”menengah 7”yang 7”mengimpor komoditi 7”beresiko 7”rendah 7”dan 7”Importir 7”yang 7”beresiko 7”rendah 7”yang mengimpor 7”komoditi 7”beresiko 7”rendah 7”atau 7”menengah.

1. Jalur 7”Kuning 7”

Jalur 7”kuning 7”adalah 7”proses 7”pelayanan 7”dan 7”pengawasan pengeluaran 7”barang 7”impor 7”dengan 7”tidak 7”dilakukan 7”pemeriksaan 7”fisik, tetapi 7”dilakukan 7”penelitian 7”dokumen 7”sebelum 7”diterbitkannya 7”Surat Persetujuan 7”Pengeluaran 7”Barang 7”(SPPB). 7”Kriteria 7”jalur 7”kuning 7”berupa Importir 7”yang 7”beresiko 7”tinggi 7”yang 7”mengimpor 7”komoditi 7”beresiko rendah, 7”artinya 7”importir 7”tersebut 7”belum 7”terlalu 7”dikenal 7”kejujurannya oleh 7”aparat 7”Bea 7”dan 7”Cukai. 7”Lazimnya, 7”mereka 7”adalah 7”importir pemula 7”atau 7”importir 7”yang 7”pernah 7”melakukan 7”illegal 7”activities 7”dan masuk 7”dalam 7”daftar 7”hitam 7”dan 7”Importir 7”yang 7”beresiko 7”menengah yang 7”mengimpor 7”komoditi 7”beresiko 7”menengah.

1. ***World*** 7”***Trade*** 7”***Organization*** 7”***atau*** 7”***WTO***
2. **Pengertian** 7”***Wolrd*** 7”***Trade*** 7”***Organization*** 7”

WTO 7”adalah 7”Organisasi 7”yang 7”mengawasi, 7”mengoprasikan, 7”serta membantu 7”jalannya 7”perdagangan 7”internasional. 7”Merupakan 7”hasil 7”dari ikatan 7”perjanjian 7”dan 7”negosiasi 7”hamper 7”seluruh 7”Negara 7”di 7”dunia, himpunan 7”ini 7”membantu 7”meneylaraskan 7”kebutuhan 7”global 7”atau 7”sebuah [organisasi 7”internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional) 7”yang 7”menaungi 7”upaya 7”untuk 7”meliberalisasi perdagangan. 7”Organisasi 7”ini 7”menyediakan 7”aturan-aturan 7”dasar 7”dalam perdagangan 7”internasional, 7”menjadi 7”wadah 7”perundingan 7”konsesi 7”dan komitmen 7”dagang 7”bagi 7”para 7”anggotanya, 7”serta 7”membantu 7”anggota anggotanya 7”menyelesaikan 7”sengketa 7”dagang 7”melalui 7”mekanisme 7”yang mengikat 7”secara 7”hukum. 7”Organisasi 7”ini 7”didirikan 7”pada 7”[1 7”Januari](https://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari) 7”[1995](https://id.wikipedia.org/wiki/1995) dengan 7”tujuan 7”untuk 7”mengurangi 7”tarif 7”dan 7”hambatan 7”perdagangan lainnya, yang 7”diharapkan 7”akan 7”memajukan 7”ekonomi 7”dan 7”meningkatkan 7”taraf hidup 7”masyarakat.[[34]](#footnote-34)

Pendahulu 7”Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia 7”adalah 7”[Perjanjian Umum 7”Tarif 7”dan 7”Perdagangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Umum_Tarif_dan_Perdagangan) 7”yang 7”ditetapkan 7”pada 7”tahun 7”1947. 7”Setelah upaya 7”untuk 7”mendirikan 7”[Organisasi 7”Perdagangan 7”Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Internasional) 7”kandas akibat 7”penolakan 7”[Kongres 7”Amerika 7”Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat) 7”untuk 7”meratifikasi 7”[Piagam Havana](https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Havana), 7”perjanjian 7”tersebut 7”menjadi 7”semacam 7”lembaga 7”[ad 7”hoc](https://id.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc) 7”dan berlaku 7”"sementara" 7”selama 7”47 7”tahun. 7”Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia menggantikan 7”perjanjian 7”ini 7”setelah 7”diberlakukannya 7”[Persetujuan Marrakesh](https://id.wikipedia.org/wiki/Persetujuan_Marrakesh) 7”yang 7”juga 7”melampirkan 7”perjanjian-perjanjian 7”utama 7”yang mengatur 7”perdagangan 7”internasional, 7”termasuk 7”Perjanjian 7”Umum 7”Tarif dan Perdagangan 7”1994 7”yang 7”menggantikan 7”perjanjian 7”tahun 7”1947. 7”WTO bermarkas 7”di 7”[Jenewa](https://id.wikipedia.org/wiki/Jenewa), 7”[Swiss](https://id.wikipedia.org/wiki/Swiss). 7”Pada 7”tahun 7”2016, 7”organisasi 7”ini beranggotakan 7”164 7”negara 7”dan 7”[wilayah 7”kepabeanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah_kepabeanan) 7”yang 7”mewakili 99,5% populasi 7”dunia 7”dan 7”98% 7”perdagangan 7”dunia. 7”Seluruh 7”anggota 7”WTO diharuskan 7”mengikuti 7”aturan-aturan 7”dasar 7”yang 7”ditetapkan 7”melalui Persetujuan 7”Marrakesh. 7”Salah 7”satu 7”aturan 7”tersebut 7”adalah 7”"[perlakuan 7”yang sama 7”untuk 7”semua 7”anggota](https://id.wikipedia.org/wiki/Perlakuan_yang_sama_untuk_semua_anggota)", 7”yang 7”berarti 7”bahwa 7”keistimewaan 7”yang diberikan 7”oleh 7”suatu 7”anggota 7”WTO 7”kepada 7”anggota 7”WTO 7”lainnya 7”juga harus 7”diberikan 7”kepada 7”seluruh 7”anggota 7”WTO. 7”Selain 7”itu, 7”berdasarkan aturan 7”"perlakuan 7”nasional", 7”anggota 7”WTO 7”harus 7”memperlakukan 7”produk asing 7”yang 7”telah 7”memasuki 7”pasar 7”domestiknya 7”sebagaimana 7”[produk "sejenis"](https://id.wikipedia.org/wiki/Barang_sejenis) 7”diperlakukan 7”di 7”negaranya. 7”Sementara 7”itu, 7”dua 7”badan pengambilan 7”keputusan 7”utama 7”di 7”WTO 7”adalah 7”Konferensi 7”Tingkat Menteri 7”dan 7”Dewan 7”Umum. 7”Para 7”anggota 7”WTO 7”mengambil 7”keputusan berdasarkan 7”konsensus, 7”tetapi 7”jika 7”konsensus 7”tidak 7”tercapai, 7”keputusan akan 7”diambil 7”melalui 7”pemungutan 7”suara. 7”Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia juga 7”memiliki 7”sistem 7”penyelesaian 7”sengketa 7”yang 7”mengikat 7”secara hukum. Perkara 7”dagang 7”antar 7”anggota 7”pertama-tama 7”akan 7”dibawa 7”ke 7”Panel 7”yang dibentuk 7”khusus 7”untuk 7”perkara 7”tersebut. 7”Pihak 7”yang 7”tidak 7”puas 7”dengan keputusan 7”Panel 7”dapat 7”membawanya 7”ke 7”[Badan 7”Banding](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Banding).

1. **Persetujuan** 7”**WTO**

*World* 7”*Trade* 7”*Organization* 7”(WTO) 7”merupakan 7”organisasi internasional 7”di 7”bidang 7”perdagangan, 7”khususnya 7”dalam 7”hal 7”perdagangan internasional. 7”Tujuan 7”utama 7”WTO 7”adalah 7”meningkatkan 7”standar 7”hidup, terciptanya 7”kesempatan 7”kerja, 7”pertumbuhan 7”pendapatan 7”yang 7”riil 7”dan permintaan 7”yang 7”efektif 7”terhadap 7”barang 7”dan 7”jasa, 7”serta 7”meningkatkan produksi 7”dan 7”perdagangan 7”dalam 7”bidang 7”barang 7”dan 7”jasa.[[35]](#footnote-35) 7”WTO dibentuk 7”berdasarkan 7”Persetujuan 7”tentang 7”Pembentukan 7”WTO 7”tahun 7”1994. Persetujuan 7”tersebut 7”mulai 7”berlaku 7”pada 7”1 7”Januari 7”1995.[[36]](#footnote-36) 7”Terbentuknya Persetujuan 7”WTO 7”tidak 7”terlepas 7”dari 7”peranan 7”*General* 7”*Agreement* 7”*on* *Tariff* 7”*and* 7”*Trade* 7”(GATT) 7”1947.

GATT 7”1947 7”merupakan 7”kodifikasi 7”sementara 7”yang 7”disusun 7”untuk mengisi 7”kekosongan 7”hukum 7”akibat 7”gagalnya 7”pemberlakuan 7”Havana Charter. 7”Dalam 7”pelaksanaannya, 7”GATT 7”1947 7”kemudian 7”berlaku 7”sebagai peraturan 7”perdagangan 7”internasional 7”yang 7”utama 7”dan 7”juga 7”menjadi organisasi 7”perdagangan 7”internasional 7”yang 7”berusaha 7”untuk 7”memenuhi kebutuhan 7”masyarakat 7”internasional. 7”GATT 7”1974 7”juga 7”berfungsi 7”sebagai forum 7”negosiasi 7”perdagangan 7”dunia 7”dan 7”forum 7”penyelesaian 7”sengketa perdagangan 7”dunia.[[37]](#footnote-37)

Pada 7”tahun 7”1960an, 7”yaitu 7”kurang 7”lebih 7”13 7”tahun 7”setelah 7”GATT 1947 7”berlaku, 7”terjadi 7”ketidakpatuhan 7”yang 7”dilakukan 7”oleh 7”negara-negara anggota 7”GATT. 7”Salah 7”satu 7”alasan 7”yang 7”menimbulkan 7”ketidakpatuhan adalah 7”penyelesaian 7”sengketa 7”yang 7”kurang 7”berfungsi 7”secara 7”maksimal.[[38]](#footnote-38) Selain 7”itu, 7”anggota 7”GATT 7”1947 7”yang 7”merupakan 7”negara 7”berkembang merasa 7”bahwa 7”aturan 7”GATT 7”1947 7”hanya 7”memberikan 7”keuntungan 7”bagi negara 7”maju 7”dan 7”membuat 7”negara 7”berkembang 7”mengalami 7”kerugian 7”atas aturan-aturan 7”tersebut.[[39]](#footnote-39) 7”Negara 7”berkembang 7”kemudian 7”meminta 7”untuk mendapatkan 7”hak-hak 7”khusus 7”agar 7”mampu 7”bersaing 7”dengan 7”negara 7”maju dan 7”mampu 7”semakin 7”berkembang 7”dalam 7”perdagangan 7”internasional.[[40]](#footnote-40)

Hal 7”ini 7”mendorong 7”dilakukannya 7”perundingan 7”Putaran 7”Uruguay tahun 7”1986-1994 7”yang 7”berakhir 7”di 7”Marakesh 7”dan 7”membuahkan 7”hasil berupa 7”GATT 7”1994.12 7”GATT 7”1994 7”telah 7”menambahkan 7”banyak pengecualian-pengecualian 7”yang 7”memudahkan 7”negara 7”berkembang 7”dalam melakukan 7”perdagangan 7”internasional. 7”GATT 7”1994 7”merupakan 7”salah 7”satu bagian 7”dalam 7”Persetujuan 7”WTO. 7”Persetujuan 7”WTO 7”pada 7”akhirnya mengambil 7”alih 7”posisi 7”GATT 7”1947 7”sebagai 7”organisasi 7”internasional 7”dan sebagai 7”peraturan 7”multilateral 7”mengenai 7”perdagangan 7”internasional.

Bukti 7”bahwa 7”masih 7”adanya 7”hubungan 7”antara 7”GATT 7”1947 7”dengan Persetujuan 7”WTO 7”atau 7”GATT 7”1994 7”sebagai 7”bagian 7”yang 7”paling 7”utama adalah 7”adanya 7”kesamaan 7”prinsip. 7”Prinsip-prinsip 7”yang 7”dimuat 7”dalam GATT 7”1947 7”dituangkan 7”kembali 7”dalam 7”Persetujuan 7”WTO 7”dan 7”berlaku tidak 7”hanya 7”bagi 7”perjanjian 7”mengenai 7”perdagangan 7”barang 7”saja, melainkan berlaku 7”juga 7”bagi 7”perdagangan 7”jasa 7”dan 7”juga 7”HKI. 7”Prinsip-prinsip tersebut 7”antara 7”lain:

1. Prinsip 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”*(MFN)*

Perlakuan 7”istimewa 7”yang 7”diberlakukan 7”bagi 7”suatu 7”negara 7”harus 7”juga dilakukan 7”terhadap 7”negara 7”lain. 7”Semua 7”negara 7”anggota 7”harus diperlakukan 7”sama

1. Prinsip 7”*resiprositas*.

Setiap 7”negara 7”harus 7”memberikan 7”perlakuan 7”timbal 7”balik 7”saat melakukan 7”hubungan 7”dagang.

1. Prinsip 7”proteksi 7”melalui 7”tarif.

Setiap 7”negara 7”diperbolehkan 7”untuk 7”menetapkan 7”tarif, 7”tetapi 7”tidak 7”boleh lebih 7”tinggi 7”dari 7”yang 7”telah 7”dicantumkan 7”dalam 7”jadwal 7”penurunan tariff.

1. Prinsip 7”*National* 7”*Treatment*

Setiap 7”negara 7”anggota 7”wajib 7”untuk 7”memberikan 7”perlakuan 7”yang 7”sama bagi 7”produk 7”impor 7”dan 7”produk 7”domestik.

1. Prinsip 7”*Transparency.*

Setiap 7”kebijakan 7”negara 7”anggota 7”yang 7”berkaitan 7”dengan 7”kepabeanan harus 7”diberitahukan 7”secara 7”terbuka 7”terhadap 7”negara-negara 7”anggota WTO 7”lainnya.

1. Prinsip 7”pembatasan 7”kualitatif.

Dilarang 7”untuk 7”melakukan 7”pembatasan 7”proteksi 7”yang 7”dapat mempengaruhi 7”jumlah 7”impor 7”maupun 7”ekspor.[[41]](#footnote-41)

Persetujuan 7”WTO 7”dibagi 7”menjadi 7”5 7”kategori, 7”yaitu 7”pengaturan mengenai 7”non-diskriminasi, 7”peraturan 7”mengenai 7”akses 7”pasar, 7”peraturan mengenai 7”perdagangan 7”yang 7”tidak 7”adil, 7”peraturan 7”mengenai 7”hubungan antara 7”liberalisasi 7”perdagangan 7”dan 7”nilai-nilai 7”serta 7”kepentingan 7”sosial lainnya, 7”dan 7”peraturan 7”mengenai 7”harmonisasi 7”perangkat 7”hukum 7”nasional dalam 7”bidangbidang 7”khusus.[[42]](#footnote-42) ”Ada 7”berbagai 7”macam 7”instrumen 7”yang merupakan 7”bagian 7”dari 7”WTO, 7”yaitu:

1. *Annex* 7”*I*:
2. *Annex* 7”*IA* 7”berisi 7”mengenai 7”persetujuan 7”multilateral 7”atas 7”perdagangan barang. 7”Perjanjian-perjanjian 7”tersebut 7”terdiri 7”dari 7”*General* *Agreement* *on* 7”*Tariff* 7”*and* 7”*Trade* 7”*(GATT)* 7”1994 7”dan 7”13 7”perjanjian 7”yang 7”lain mengenai 7”aspek 7”khusus 7”perdagangan 7”barang.
3. *Annex* 7”*IB* 7”berisi 7”mengenai 7”Persetujuan 7”yang 7”mengatur 7”mengenai perdagangan 7”jasa;
4. *Annex* 7”*IC* 7”berisi 7”mengenai 7”Persetujuan 7”yang 7”mengatur 7”mengenai Hak 7”Kekayaan 7”Intelektual 7”(HKI).
5. *Annex* 7”*II*: 7”Pengaturan 7”mengenai 7”cara-cara 7”penyelesaian 7”sengketa 7”WTO.
6. *Annex* 7”*III*: 7”Pengaturan 7”mengenai 7”mekanisme 7”peraturan 7”perdagangan.
7. *Annex* 7”*IV*: 7”Persetujuan 7”yang 7”hanya 7”mengikat 7”negara-negara 7”yang 7”menyatakan 7”ikut 7”serta 7”saja.[[43]](#footnote-43)

*Annex* 7”*I* 7”merupakan 7”persetujuan 7”yang 7”paling 7”utama, 7”karena mengatur 7”mengenai 7”perdagangan 7”barang, 7”jasa, 7”dan 7”HKI.[[44]](#footnote-44) 7”Salah 7”satu aturan 7”yang 7”penting 7”dalam 7”perdagangan 7”barang 7”adalah 7”aturan 7”mengenai anti-dumping. 7”Anti 7”dumping 7”ada 7”dalam 7”*Annex* 7”*1*, 7”yaitu 7”dalam 7”Article 7”VI GATT 7”1994. 7”Persetujuan 7”mengenai 7”anti 7”dumping 7”pertama 7”kali dirundingkan 7”pada 7”Putaran 7”Kenedy 7”yaitu 7”pada 7”tahun 7”1967.[[45]](#footnote-45) 7”Persetujuan tersebut 7”ditandatangani 7”oleh 7”perwakilan 7”dari 7”17 7”negara.

**BAB** 7”**III**

**PEMBAHASAN**

1. **Prinsip** 7”***Non*** 7”***Diskriminasi*** 7”**Impor** 7”**Pakaian** 7”**Bekas** 7”**Dalam** 7”**Presfektif** 7”***World*** ***Trade*** 7”***Organizaton*** 7”***(WTO)***

*World* 7”*Trade* 7”*Organization* 7”(WTO) 7”atau 7”Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia 7”merupakan 7”satu 7”satunya 7”badan 7”internasional 7”yang 7”secara 7”khusus 7”mengatur 7”masalah 7”perdagangan 7”antar 7”negara. 7”Sistem 7”perdagangan 7”multilateral 7”WTO 7”diatur 7”melalui 7”suatu 7”persetujuan 7”yang 7”berisi 7”aturan- aturan 7”dasar 7”perdagangan 7”internasional 7”sebagai 7”hasil 7”perundingan 7”yang 7”telah 7”ditandatangani 7”oleh 7”negara-negara 7”anggota. 7”Persetujuan 7”tersebut 7”merupakan 7”kontrak 7”antar 7”negara-anggota 7”yang 7”mengikat 7”pemerintah 7”untuk 7”mematuhinya 7”dalam 7”pelaksanaan 7”kebijakan 7”perdagangannya.[[46]](#footnote-46)

Perdagangan 7”bebas 7”multilateral 7”khususnya 7”bidang 7”perdagangan 7”menuju 7”pasar 7”bebas 7”dimulai 7”secara 7”resmi 7”pada 7”tahun 7”1994, 7”sejak 7”terbentuknya 7”*World* 7”*Trade* 7”*Organization* 7”(WTO) 7”yang 7”merupakan 7”hasil 7”Perundingan 7”Putaran 7”Uruguay 7”yang 7”diselenggarakan 7”dalam 7”kerangka 7”*General* 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Tariff* 7”*and* 7”*Trade* 7”(GATT), 7”yang 7”dimulai 7”pada 7”September 7”1986 7”di 7”Punta 7”del 7”Este, 7”Uruguay 7”dan 7”berakhir 7”pada 7”15 7”April 7”1994 7”di 7”Marrakesh, 7”Maroko. 7”[[47]](#footnote-47)

Prinsip 7”utama 7”yang 7”menjadi 7”dasar 7”GATT 7”adalah 7”prinsip 7”non 7”diskriminasi. 7” 7”Prinsip 7” 7”ini 7” 7”dilandasi 7” 7”oleh 7” 7”prinsip 7” 7”persamaan 7”kedudukan 7”dalam 7”hukum 7”internasional 7”(equality). 7”Prinsip 7”ini 7”melarang 7”negara 7” 7”memberikan 7” 7”perlakuan 7” 7”yang 7”berbeda 7”(diskriminasi) 7”dalam 7”melakukan 7”aktivitas 7”ekonomi 7”internasionalnya.[[48]](#footnote-48)

Prinsip 7”*non* 7”*diskriminasi* 7”ini 7”dapat 7”dibedakan 7”menjadi 7”dua, 7”yaitu 7”Prinsip 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”*dan* 7”*Prinsip* 7”*National* 7”*Treatment*: 7”

1. Prinsip 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation*

Prinsip 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”yang 7”selanjutnya 7”disebut 7”dengan prinsip 7”MFN 7”merupakn 7”prinsip 7”yang 7”terpenting 7”dalam 7”hukum 7”ekonomi internasional.[[49]](#footnote-49) 7”Secara 7”ringkas 7”MFN 7”adalah 7”prinsip 7”perdagangan internasional 7”antar 7”negara 7”anggota 7”harus 7”dilakukan 7”secara 7”non diskriminasi. 7”Prinsip 7”ini 7”mensyaratkan 7”bagi 7” 7”suatu 7” 7”negara 7” 7”pemerintah 7” untuk 7” 7”tidak 7” 7”memberikan 7”perlakuan 7” 7”diskriminasi 7” 7”antara 7” 7”jasa 7” 7”dan 7” pemberi 7” 7”jasa 7” 7”dari 7”Negara- 7”negara 7” 7”lainnya. 7” 7”Setiap 7” 7”tindakan 7” 7”yang 7” mendiskriminasikan 7”antara 7”jasa 7”dan 7”pemasok 7”jasa 7”suatu 7”Negara 7”dengan jasa-jasa 7” 7”dan 7” 7”pemasok 7” 7”jasa 7” 7”dari 7” 7”negara 7” 7”anggota 7” 7”lainnya bertentangan 7”dengan 7”persetujuan 7”*General* 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Trade* 7”*in* 7”*Service* (GATs). 7”Konsekuensi 7”dianutnya 7”prinsip 7”ini 7”oleh 7”GATs 7”adalah 7”setiap negara 7”anggota 7”yang 7”menimbulkan 7”diskriminasi 7”terhadap 7”sesama 7”pemasok jasa 7”asing, 7”bertentangan 7”dengan 7”GATs 7”kecuali 7”telah 7”diajukan pengecualian sementara 7”terhadap 7”penetapan 7”prinsip 7”*Most* 7”*Favoured* 7”*Nation* 7”(MFN). Pendek 7”kata, 7”semua 7”negara 7”harus 7”diperlakukan 7”atas 7”dasar 7”yang 7”sama dan semua 7”negara 7”menikmati 7”keuntungan 7”dari 7”suatu 7”kebijkasanaan perdagangan.[[50]](#footnote-50) 7”alam 7”pelaksanaannya 7”prinsip 7”ini 7” 7”mendapat 7” pengecualiannya, 7” 7”khusus 7” 7”dalam 7” 7”menyangkut 7”kepentingan 7”negara sedang 7”berkembang. 7”

1. Prinsip 7”*National* 7”*Treatment*

Apabila 7” 7”prinsip 7” 7”MFN 7” 7”melarang 7” 7”negara 7” 7”memberikan perlakuan 7” 7”berbeda 7” 7”antara 7” 7”negara 7” 7”asing 7” 7”yang 7” 7”satu 7” 7”dengan 7”negara yang 7”lain, 7”maka 7”Prinsip 7”National 7”Treatment 7”melarang 7”negara 7” 7”meberikan perlakuan 7” 7”berbeda 7” 7”antara 7” 7”perusahaan 7”nasional 7”atau 7”produk 7”asing. Prinsip 7”ini 7”terdapat 7”dalam 7”Pasal 7”XVII 7”GATs. 7”Tujuan 7”dari 7”prinsip 7”ini adalah 7”untuk 7”menciptakan 7”harmonisasi 7”perdagangan 7”agar 7”tidak 7”terjadi perlakuan 7”yang 7”diskriminatif. 7”Dalam 7”prinsip 7”ini 7”terdapat 7”konsep 7”liberal yang 7”membatasi 7”campur 7”tangan 7”pemerintah 7”dalam 7”pasar 7”perdagangan domestik 7”agar 7”semua 7”produk 7”yang 7”beredar 7”dapat 7”bersaing 7”dengan 7”wajar dan 7”bebas 7”hambatan.[[51]](#footnote-51) 7”Prinsip 7”*National* 7”*treatment* 7”mensyaratkan 7”bahwa setiap 7”Negara 7”anggota 7”untuk 7”memperlakukan 7”jasa-jasa 7”dan 7”pemberi 7”jasa dari 7”Negara-negara 7”anggota 7”lainnya 7”harus 7”sama 7”dengan 7”perlakuan 7”yang diberikan 7”terhadap 7”jasa 7”atau 7”pemberi 7”jasa 7”dari 7”negaranya. 7”Perlakuan terhadap 7”jasa 7”dan 7”pemberi 7”jasa 7”ini 7”wajib 7”berlaku 7”pada 7”sektor-sektor yang tercantum 7”dalam 7”*Schedule* 7”*of* 7”*Commitment* 7”(SoC) 7”beserta 7”persyaratan persyaratannya. Karena7”itu”setiap negara anggota dapat 7”mendaftarkan sejumlah persyaratan dan kualifikasi 7” 7”terhadap 7” 7”penerapan 7”prinsip 7”*National* *Treatment* dan 7”mencantumkannya 7”di 7”dalam 7”daftar 7”komitmen 7”nasional. 7”Negara anggota 7”lain 7”hanya 7”dapat 7”menuntut 7”perlakuan 7”nasional 7”(National Treatment) 7”dari 7”satu 7”negara 7”sesuai 7”dengan 7”yang 7”tercantum 7”dalam 7”daftar komitmen 7”negara 7”tersebut.

Setiap 7”negara 7”peserta, 7”berkenaan 7”dengan 7”sektor 7”maupun 7” 7”sub-sektor 7” 7”yang 7” 7”dinyatakan 7” 7”dalam 7”*Schedule* 7” 7”*of* 7”*Commitment* 7”dan 7”tunduk pada 7”semua 7”kondisi 7”dan 7”kualifikasi 7”yang 7”etercantum 7”di 7”dalamnya, 7”harus memberikan 7”perlakuan 7”yang 7” 7”tidak 7” 7”berbeda 7” 7”terhadap 7” 7”jasa 7” 7”dan 7” pemasok 7” 7”jasa 7” 7”dari 7”negara 7”lain 7”sebagaimana 7”perlakuan 7”yang 7”ia 7”berikan kepada 7”jasa 7”dan 7”pemasok 7”jasa 7”domestik 7”negara 7”tersebut. 7”Pemberlakuan 7” prinsip 7”*National* 7” 7”*Treatment* 7”dalam 7”GATs 7”berbeda 7”dengan 7”pemberlakuan di 7”GATT, 7”karena 7”di 7”dalam 7”ketentuan 7”GATs 7” 7”pemberlakuan 7” 7”prinsip *National* 7” 7”*Treatment* 7”hanya 7” 7”terbatas 7”dan 7” 7”tidak 7” 7”berlaku 7” 7”umum. 7” 7”Di 7” dalam 7” 7”GATs 7”*prinsip* 7”*National* 7”*Treatment* 7”hanya 7”berlaku 7”bagi 7”negara-negara 7”anggota 7”*World* 7” 7”*Trade* 7” 7”*Organization* 7”(WTO) 7” 7”yang 7” 7”telah mendaftarkan 7”komitmen 7”spesifik 7”terhadap 7”sektor 7”jasa 7”yang 7”dipilihnya. Dua 7” 7”kumpulan 7” 7”kewajiban 7” 7”yang 7” 7”terdapat 7” 7”dalam 7”GATs 7”yakni pertama kumpulan 7”tentang 7”konsep, 7”prinsip 7”dan 7”aturan 7”yang 7”menciptakan kewajiban 7”yang 7”berlaku 7”bagi 7”seluruh 7”measures 7”yang 7” 7”mempengaruhi 7” perdagangan 7” 7”jasa. 7” 7”Kedua 7”kumpulan-kumpulan 7”tentang 7”kewajiban khusus hasil 7”negosiasi 7”yang 7”merupakan 7”komitmen 7”yang 7”berlaku 7”untuk 7”sektor 7 jasa 7”dan 7”subsektor 7”yang 7”terdaftar 7”dalam 7”schedules 7”of 7”Commitment 7”(SoC) negara 7”anggota.[[52]](#footnote-52)

Penandatangan 7”persetujuan 7”akhir 7”yang 7”memuat 7”hasil-hasil 7Perundingan Perdagangan 7”Multilateral 7”Putaran 7”uruguay 7”(*Final* 7”*Act* 7”*Embodying* 7”*The* 7*Results* *of* 7”*The* 7”*Uruguay* 7”*Round* 7”*of* 7”*Multilateral* 7”*Trade* 7”*Negotiations*) 7”pada 7”tanggal 7”15 April 7”1994 7”di 7”Marrakesh, 7”Maroko, 7”negara 7”peserta 7”perundingan 7”menyepakati bahwa 7”Persetujuan 7”Pembentukan 7”Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia 7”(*Agreement* *Establishing* 7”*The* 7”*World* 7”*Trade* 7”*Organization*) 7”beserta 7”seluruh 7”Lampirannya diharapkan 7”akan 7”dapat 7”mulai 7”diberlakukan 7”pada 7”tanggal 7”1 7”Januari 7”1995. Namun 7”demikian, 7”kepastian 7”mengenai 7”tanggal 7”mulai 7”berlaku 7”efektifnya Persetujuan 7”tingkat 7”Menteri 7”yang 7”bertanggung 7”jawab 7”di 7”bidang 7”Perdagangan dari 7”negara-negara 7”penandatangan 7”Persetujuan 7”Pembentukan 7”Organisasi Perdagangan 7”Dunia 7”yang 7”akan 7”diadakan 7”selambatlambatnya 7”sebelum 7”akhir tahun 7”1994.[[53]](#footnote-53)

Elemen-elemen 7”kunci 7”dari 7”Perjanjian 7”WTO 7”dapat 7”diringkas 7”ke 7”dalam 3 7”hal 7”yaitu:

1. Perjanjian 7”WTO 7”akan 7”mempertinggi 7”sosok 7”GATT 7”dengan pembentukan 7”suatu 7”institusi 7”yang 7”permanen 7”untuk 7”mengawasi pelaksanaan 7”dan 7”perkembangan 7”dari 7”semua 7”perjanjian 7”yang dilingkupinya;
2. Perjanjian 7”WTO 7”akan 7”meningkatkan 7”penegakan 7”kewenangan 7”atau *enforcement* 7”*of* 7”*powers* 7”dari 7”GATT 7”dengan 7”kelengkapan pengintegrasian 7”dan 7”perbaikan 7”proses 7”penyelesaian 7”sengketa;
3. Perjanjian 7”WTO 7”merupakan 7”upaya, 7”melalui 7”upaya 7”single undertaking 7”approach 7”untuk 7”menghilangkan 7”masalah 7”free 7”rider dengan 7”mempertegas 7”keharusan 7”negara-negara 7”anggota 7”untuk tunduk 7”kepada 7”semua 7”Code 7”dan 7”Perjanjian 7”yang 7”dinegosiasikan dalam 7”Tokyo 7”Round 7”dan 7”yang 7”disempurnakan 7”dalam 7”Uruguay Round, 7”kecuali 7”untuk 7”beberapa 7”perjanjian 7”plurilateral 7”tertentu yang dibuat 7”dalam 7”Tokyo 7”Round, 7”serta 7”membatasi 7”secara 7”ketat 7”hak negara 7”Anggota 7”untuk 7”menggunakan 7”reservation 7”terhadap perjanjian-perjanjian 7”tersebut.[[54]](#footnote-54)

Kemudian 7”Indonesia 7”meratifikasi 7”57 7”Perjanjian 7”Pembentukan Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia 7”melalui 7”undang-undang 7”Nomor 7”7 7”tahun 7”1994 tentang 7”Pengesahan 7”*Agreement* 7”*Establishing* 7”*The* 7”*World* 7”*Trade* 7”*Organization* maka 7”resmi 7”menjadi 7”anggota 7”dari 7”WTO 7”dan 7”tunduk 7”serta 7”patuh 7”atas aturan-aturan 7”perdagangan 7”dunia 7”yang 7”telah 7”disepakati 7”dan 7”tercantum 7”dalam GATT 1994. 7”Seluruh 7”perjanjian 7”WTO 7”dianggap 7”sebagai 7”single 7”undertaking, 7”semua negara 7”anggota 7”WTO 7”menandatangani 7”perjanjian- 7”perjanjian 7”WTO 7”sebagai satu 7”kesatuan 7”paket.[[55]](#footnote-55)

Berdasarkan 7”*Final* 7”*Act* 7”*Embodying* 7”*The* 7”*Results* 7”*of* 7”*The* 7”*Uruguay* *Round* 7”*of* 7”*Multilateral* 7”*Trade* 7”*Negotiations* 7”pada 7”poin 7”(2) 7”diketahui 7”bahwa ada 7”dua 7”hal 7”yang 7”disetujui 7”oleh 7”Indonesia 7”yaitu 7”meratifikasi 7”perjanjian-perjanjian 7”WTO 7”dan 7”mengadopsi 7”*Ministerial* 7”*Declaration* 7”*and* 7”*decisions*. Berdasarkan 7”uraian 7”tersebut 7”di 7”atas 7”dapat 7”disimpulkan 7”bahwa 7”sumber hukum kepabeanan 7”selain 7”berdasarkan 7”Undang-undang 7”Kepabeanan, 7”juga 7”harus mengacu 7”pada 7”Undang-undang 7”Pengesahann 7”WTO 7”yang 7”didalamnya 7”telah meratifikasi 7”dan 7”mengesahkan 7”seluruh 7”isi 7”perjanjian 7”WTO 7”yang 7”merupakan Naskah 7”Paket 7”Persetujuan 7”Putaran 7”Uruguay 7”terdiri 7”dari 7”3 7”bagian, 7”yaitu:

1. *Final* 7”*Act* 7”*Embodying* 7”*the* 7”*Results* 7”*of* 7”*the* 7”*Uruguay* 7”*Round* 7”*of* 7”*Multilateral* *Trade* 7”*Negotiations* 7”(Persetujuan 7”Akhir 7”yang 7”Memuat 7”Hasil-hasil Perundingan 7”Perdagangan 7”Multilateral 7”Putaran 7”Uruguay), 7”yang 7”merupakan rangkuman 7”ringkas 7”mengenai 7”hasil-hasil 7”yang 7”dicapai 7”dalam 7”perundingan Putaran 7”Uruguay;
2. *Agreement* 7”*Establishing* 7”*the* 7”*World* 7”*Trade* 7”*Organization* 7”(Persetujuan Pembentukan 7”Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia), 7”yang 7”merupakan persetujuan pembentukan 7”Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia 7”berikut 7”beberapa 7”naskah persetujuan 7”yang 7”dijadikan 7”lampiran 7”pada 7”Persetujuan 7”Pembentukan Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia;
3. *Ministerial* 7”*Decisions* 7”*and* 7”*Declarations* 7”(Keputusan 7”dan 7”Deklarasi 7”Menteri), 7”yang 7”memuat 7”berbagai 7”Deklarasi 7”atau 7”Keputusan 7”Tingkat 7”Menteri 7”mengenai 7”pelaksanaan 7”persetujuan 7”yang 7”berhasil 7”dicapai.

Salah 7”satu 7”*agreement* 7”yang 7”menjadi 7”bagian 7”dari 7”Undang-undang Pengesahan 7”WTO 7”adalah 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Implementation* 7”*of* 7”*Article* 7”*VII* 7”*of* *General* 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Trade* 7”*and* 7”*Tariff* 7”(GATT) 7”1994 7”atau 7”biasa 7”disebut GATT/ 7”WTO 7”*Valuation* 7”*Agreement* 7”dan 7”terdapat 7”*Ministerial* 7”*Decision* 7”yang penting 7”dalam 7”mengklarifikasi 7”masalah 7”beban 7”pembuktian, 7”yaitu 7”*Ministerial* *Decision* 7”tentang 7”Keputusan 7”Mengenai 7”Kasus 7”Dimana 7”Kepabeanan 7”Memiliki Alasan 7”untuk 7”Meragukan 7”Kebenaran 7”atau 7”akurasi 7”Nilai 7”yang 7”diberitahukan *Decision* 7”*Regarding* 7”*Cases* 7”*Where* 7”*Customs* 7”*Administrations* 7”*Have* 7”*Reasons* *to* *Doubt* 7”*the* 7”*Truth* 7”*or* 7”*Accuracy* 7”*of* 7”*the* 7”*Declared* 7”*Value*.[[56]](#footnote-56)

Dalam 7”Pasal 7”18 7”WTO 7”*Valuation* 7”*Agreement* 7”diatur 7”pembentukan suatu Komite 7”Penilaian 7”Pabean 7”(selanjutnya 7”disebut 7”Komite), 7”yang 7”terdiri 7”dari perwakilan 7”masing-masing 7”anggota. 7”Komite 7”berkewajiban 7”memilih 7”Ketuanya dan 7”bersidang 7”sekali 7”dalam 7”setahun, 7”atau 7”sebagaimana 7”diatur 7”menurut ketentuanketentuan 7”persetujuan 7”ini, 7”dengan 7”tujuan 7”memberi 7”kesempatan kepada 7”para 7”anggota 7”untuk 7”berkonsultasi 7”dalam 7”masalah-masalah 7”yang berkaitan 7”dengan 7”sistem 7”penilaian 7”pabean 7”yang 7”diajukan 7”oleh 7”anggota, 7”yang kemungkinannya 7”dapat 7”mempengaruhi 7”pelaksanaan 7”persetujuan 7”ini 7”atau mempengaruhi 7”sasaran-sasaran 7”persetujuan 7”ini. 7”Komite 7”juga 7”menjalankan tugas-tugas 7”lain 7”yang 7”dibebankan 7”kepadanya 7”oleh 7”para 7”anggota.

Pada 7”Pasal 7”18 7”ayat 7”(2) 7”WTO 7”*Valuation* 7”*Agreement* 7”menyatakan bahwa 7”akan 7”dibentuk 7”Suatu 7”Komite 7”Teknis 7”Penilaian 7”Pabean 7”(selanjutnya disebut 7”Komite 7”Teknis) 7”di 7”bawah 7”naungan 7”*Customs* 7”*Co-operation* 7”*Council* dan 7”saat 7”ini 7”disebut 7”dengan 7”*World* 7”*Customs* 7”*Organization*, 7”yang 7”akan menjalankan 7”kewajiban-kewajiban 7”sebagaimana 7”diatur 7”dalam 7”Lampiran 7”II Persetujuan 7”ini 7”dan 7”harus 7”melaksanakan 7”tugasnya 7”sesuai 7”dengan 7”ketentuan ketentuan 7”yang 7”terdapat 7”di 7”dalamnya.

Annex 7”II 7”WTO 7”*Valuation* 7”*Agreement* 7”tentang 7”Komite 7”Teknik 7”Nilai Pabean 7”telah 7”diberikan 7”wewenang 7”oleh 7”WTO 7”untuk 7”mengatur 7”aspek-aspek teknis 7”dari 7”WTO 7”*Valuation* 7”*Agreement*. 7”*Technical* 7”*Committee* 7”*on* 7”*Customs* *Valuation* 7”telah 7”merumuskan 7”berbagai 7”instrument 7”kebijakan 7”yang 7”ditujukan kepada 7”harmonisasi 7”dan 7”standarisasi 7”pelaksanaan 7”dan 7”administrasi 7”dari WTO *Valuation* 7”*Agreement* 7”diantara 7”*contracting* 7”*parties* 7”WTO.

Pedoman 7”yang 7”terdapat 7”dalam 7”instrument 7”dari 7”WCO 7”*Technical* *Committee* 7”*on* 7”*Customs* 7”*Valuation* 7”dimaksudkaan 7”untuk 7”membantu 7”Anggota WTO 7”untuk 7”dipertimbangkan 7”dan 7”dimasukkan 7”ke 7”dalam 7”peraturan 7”nasional tentang 7”nilai 7”pabean 7”sesuai 7”dengan 7”WTO 7”*Valuation* 7”*Agreement*. 7”Didalam *Valuation* 7”*Compendium*-nya 7”WCO 7”telah 7”menerbitkan 7”berbagai 7”istrumen kebijakan 7”yang 7”dikenal 7”dengan 7”istilah 7”*best* 7”*practice*.‟ 7”Instrumen 7”tersebut dimasukkan 7”untuk 7”menjelaskan 7”apa 7”saja 7”yang 7”merupakan 7”*best* 7”*practices* untuk 7”membantu 7”interpretasi 7”dan 7”aplikasi 7”yang 7”seragam 7”dari 7”ketentuan ketentuan 7”dalam 7”WTO 7”Valuation 7”Agreement.

1. **Penerapan** 7”**Prinsip** 7”**Non** 7”**Diskriminasi** 7”**Impor** 7”**Pakaian** 7”**Bekas** 7”**di** 7”**Indonesia**

Salah 7”satu 7”pertimbangan 7”dibuatnya 7”Undang-undang 7”Kepabeanan 7”ini adalah 7”untuk 7”lebih 7”menjamin 7”kepastian 7”hukum, 7”keadilan, 7”transparansi 7”dan akuntabilitas 7”pelayanan 7”publik, 7”untuk 7”mendukung 7”upaya 7”peningkatan 7”dan pengembangan 7”perekonomian 7”nasional 7”yang 7”berkaitan 7”dengan 7”perdagangan global, 7”untuk 7”mendukung 7”kelancaran 7”arus 7”barang 7”dan 7”meningkatkan efektivitas 7”pengawasan 7”atas 7”lalu 7”lintas 7”barang 7”yang 7”masuk 7”atau 7”keluar daerah 7”pabean 7”Indonesia 7”dan 7”lalu 7”lintas 7”barang 7”tertentu 7”dalam 7”daerah pabean 7”Indonesia, 7”serta 7”untuk 7”mengoptimalkan 7”pencegahan 7”dan 7”penindakan ekpor-impor 7”secara 7”illegal.[[57]](#footnote-57)

Dilihat 7”dari 7”latar 7”belakang 7”pembentukan 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”17 tahun 7”2006 7”tentang 7”Perubahan 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”10 7”tahun 7”1995 tentang 7”Kepabeanan 7”(Selanjutnya 7”disebut 7”Undang-undang 7”Kepabeanan) 7”pada diktum 7”Mengingat 7”salah 7”satunya 7”mencantumkan 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”7 Tahun 7”1994 7”tentang 7”Pengesahan 7”*Agreement* 7”*Establishing* 7”*the* 7”*World* 7”*Trade* *Organization* 7”(Lembaran 7”Negara 7”Republik 7”Indonesia 7”Tahun 7”1994 7”Nomor 7”57, Tambahan 7”Lembaran 7”Negara 7”Republik 7”Indonesia 7”Nomor 7”3564), 7”dengan demikian 7”merupakan 7”pelaksanaan 7”atas 7”komitmen 7”liberalisasi 7”perdagangan sebagai 7”konsekuensi 7”Indonesia 7”menjadi 7”salah 7”satu 7”anggota 7”WTO.

Anggota 7”WTO, 7”Indonesia 7”memang 7”wajib 7”menyesuaikan 7”semua perundang-undangannya 7”dengan 7”ketentuan 7”WTO. 7”Ketentuan 7”Nilai 7”Pabean dalam 7”Undang-Undang 7”Kepabeanan 7”diatur 7”dalam 7”satu 7”pasal 7”yaitu 7”pasal 7”15. Bila 7”dibandingkan 7”dengan 7”UndangUndang 7”Nomor 7”10 7”tahun 7”1995 7”perubahan dalam 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”17 7”tahun 7”2006 7”yaitu 7”disisipkannya 7”Pasal 7”15 ayat 7”3a. 7”Sebagaimana 7”disebutkan 7”dalam 7”Penjelasan 7”Umum 7”dalam UndangUndang, 7”alasan 7”hukum 7”penambahan 7”pasal 7”15 7”ayat 7”3a 7”adalah: “Sesuai dengan 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Implementation* 7”*of* 7”*Article* 7”*VII* 7”*of* 7”*General* 7”*Agreement* *on* 7”*Trade* 7”*and* 7”*Tariff* 7”(GATT) 7”1994, 7”Article 7”22 7”menyebutkan 7”bahwa perundangundangan 7”nasional 7”harus 7”memuat 7”ketentuan 7”penetapan 7”nilai pabean sesuai 7”*World* 7”*Trade* 7”*Organization* 7”(WTO) 7”*Valuation* 7”*Agreement*. 7”Dalam Article 7”4 7”Konvensi 7”tersebut 7”diatur 7”bahwa 7”metode 7”komputasi 7”dapat digunakan mendahului 7”metode 7”deduksi 7”atas 7”permintaan 7”importir. 7”Indonesia 7”telah menggunakan 7”kesempatan 7”untuk 7”menunda 7”pelaksanaan 7”Article 7”4 7”Konvensi tersebut 7”selama 7”5 7”(lima) 7”tahun 7”yang 7”berakhir 7”pada 7”tahun 7”2000, 7”sehingga ketentuan 7”penetapan 7”nilai 7”pabean 7”sesuai 7”Article 7”4 7”Konvensi 7”tersebut 7”harus dimasukkan 7”dalam 7”perubahan 7”Undang-Undang 7”Kepabeanan 7”ini.[[58]](#footnote-58)

Undang-undang 7”Kepabeanan 7”telah 7”tegas 7”mengamanatkan 7”bahwa peraturan 7”perundang-undangan 7”nasional 7”harus 7”memuat 7”ketentuan 7”penetapan nilai 7”pabean 7”sesuai 7”*World* 7”*Trade* 7”*Organization* 7”*(WTO)* 7”*Valuation* 7”*Agreement*. Tentunya 7”termasuk 7”juga 7”peraturan 7”pelaksanaannya 7”sebagaimana 7”Pasal 7”15 ayat (7) 7”UndangUndang 7”Kepabeanan 7”yang 7”menyatakan: 7”“Ketentuan 7”mengenai nilai pabean 7”Untuk 7”penghitungan 7”bea 7”masuk 7”diatur 7”lebih 7”lanjut 7”dengan 7”atau berdasarkan 7”peraturan 7”menteri”. 7”Peraturan 7”Menteri 7”Keuangan 7”yang 7”dimaksud tersebut 7”dan 7”yang 7”berlaku 7”saat 7”ini 7”adalah 7”Peraturan 7”Menteri 7”Keuangan Nomor 7”160/PMK. 7”04/2010 7”Tentang 7”Nilai 7”Pabean 7”Untuk 7”Penghitungan 7”Bea Masuk 7”(PMK 7”160/2010).

Perkembangan 7”hukum 7”internasional 7”yang 7”cepat 7”dewasa 7”ini 7”merupakan konsekuensi 7”dari 7”hubungan 7”internasional 7”yang 7”intensif 7”dan 7”luas 7”antar bangsa telah 7”melahirkan 7”berbagai 7”macam 7”norma 7”hukum 7”internasional 7”dalam 7”format perjanjian 7”internasional.[[59]](#footnote-59) 7”Indonesia 7”perlu 7”memperhatikan 7”perkembangan peran 7”dan 7”status 7”negara 7”sebagai 7”subjek 7”hukum 7”internasional 7”dengan 7”baik, mengingat 7”baik 7”secara 7”langsung 7”maupun 7”tidak 7”langsung, 7”norma 7”yang menyangkut 7”kepentingan 7”bersama 7”dan 7”diwujudkan 7”dalam 7”perjanjian internasional. 7”

Walaupun 7”atas 7”nama 7”kedaulatan, 7”negara 7”dapat 7”saja 7”menolak berlakunya 7”suatu 7”norma 7”hukum 7”internasional, 7”tekanan 7”kepentingan internasional 7”agar 7”suatu 7”negara 7”menerima 7”keadaan 7”suatu 7”norma 7”hukum internasional 7”akan 7”sulit 7”untuk 7”ditolak 7”khususnya 7”dibidang 7”lingkungan 7”hidup dan 7”perdagangan.[[60]](#footnote-60) 7”Sehingga 7”norma 7”hukum 7”yang 7”dapat 7”diwujudkan 7”dalam bentuk 7”perjanjian 7”internasional 7”dapat 7”membayangi 7”kepentingan 7”nasional 7”dan kedaulatan 7”Negara.

Pemanfaatan 7”norma 7”hukum 7”internasional 7”yang 7”sudah 7”ada 7”dan 7”sedang berkembang 7”sebagaimana 7”yang 7”dimaksud 7”dapat 7”menjadi 7”salah 7”satu 7”pilihan dalam 7”mengembangkan 7”sistem 7”hukum 7”nasional 7”tanpa 7”harus 7”merusak 7”tatanan dan 7”identitas 7”apalagi 7”kedaulatan 7”hukum 7”nasional.[[61]](#footnote-61) 7”Nasionalisasi 7”hukum internasional 7”berbasis 7”identitas 7”nasional 7”kiranya 7”layak 7”untuk dipertimbangkan dalam 7”rangka 7”menciptakan 7”suatu 7”model 7”law 7”Indonesia 7”dibidang 7”hukum perjanjian 7”internasional.

Saat 7”ini 7”negara-negara 7”di 7”dunia 7”sedang 7”merasakan 7”interdependensi satu 7”sama 7”lain. 7”Salah 7”satu 7”bentuk 7”interdependensinya 7”yaitu 7”adanya hubungan perdagangan 7”internasional. 7”Ciri 7”perdagangan 7”internasional 7”yaitu 7”adanya hubungan 7”dagang 7”yang 7”dilakukan 7”antarlintas 7”batas 7”negara. 7”Dalam 7”upaya membangun 7”hubungan 7”lintas 7”negara 7”yang 7”tertib, 7”perlu 7”dibuat 7”ketentuan berupa 7”aturan 7”hukum 7”yang 7”bertujuan 7”untuk 7”menjamin 7”terciptanya perdagangan 7”yang 7”fair. 7”Kemudian, 7”dibentuk 7”GATT 7”(*General* 7”*Agreement* 7”*on* *Tariff* 7”*and* 7”*Trade*) 7”untuk 7”mengatur 7”kegiatan 7”perdagangan, 7”namun 7”ternyata GATT 7”dirasa 7”kurang 7”cukup 7”untuk 7”mengatur 7”segala 7”kegiatan 7”perdagangan internasional. 7”Hingga 7”akhirnya 7”dibentuklah 7”WTO 7”(*World* 7”*Trade* *Organization*). 7”WTO 7”merupakan 7”suatu 7”lembaga 7”yang 7”akan 7”berfungsi melaksanakan 7”berbagai 7”perjanjian.

Setiap 7”negara 7”mempunyai 7”peraturan 7”serta 7”sistem 7”perdagangan 7”yang berbeda-beda. 7”Peraturan-peraturan 7”tersebut 7”mengandung 7”berbagai 7”pembatasan yang 7”dikeluarkan 7”oleh 7”masing-masing 7”pemerintah 7”sehingga 7”antara 7”satu negara 7”dengan 7”negara 7”lainnya 7”tidak 7”jarang 7”terdapat 7”perbedaan 7”dalam hukum, dan 7”lain 7”sebagainya. 7”Dalam 7”pembentukan 7”WTO 7”terdapat 7”salah 7”satu 7”bentuk perjanjian 7”terkait 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Import* 7”*Licensing* 7”*Procedures*. 7”Tujuan 7”yang hendak 7”dicapai 7”dari 7”ketentuanketentuan 7”yang 7”terdapat 7”dalam 7”peraturan tersebut 7”yaitu 7”untuk 7”meminimalisir 7”terjadinya 7”konflik 7”antar 7”negara 7”terkait perdagangan 7”internasional 7”khususnya 7”di 7”bidang 7”impor.

*Agreement* 7”*on* 7”*Import* 7”*Licensing* 7”*Procedures* 7”merupakan 7”prosedur administratif 7”yang 7”digunakan 7”sebagai 7”persyaratan 7”didalam 7”pengajuan permohonan 7”atau 7”dokumentasi 7”tertentu 7”kepada 7”badan 7”administrasi 7”yang berwenang 7”dan 7”harus 7”dipenuhi 7”sebelum 7”proses 7”impor 7”barang.

Pada 7”dasarnya, 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Import* 7”*Licensing* 7”*Procedures* 7”ini memuat 7”batasan-batasan 7”yang 7”menetapkan 7”sejauh 7”mana 7”negara-negara anggota 7”WTO 7”boleh 7”menerapkan 7”kebijakan 7”administratifnya. 7”Tidak 7”hanya WTO, 7”Indonesia 7”juga 7”mempunyai 7”ketentuan 7”yang 7”mengatur 7”mengenai batasan-batasan 7”yang 7”menetapkan 7”sejauh 7”mana 7”importir 7”dapat 7”melakukan kegiatan 7”impor 7”di 7”Indonesia. 7”Hal 7”ini 7”termaktub 7”pada 7”Pasal 7”35 7”Undang Undang 7”Nomor 7”7 7”Tahun 7”2014 7”tentang 7”Perdagangan 7”dan 7”dalam 7”Peraturan Menteri 7”Perdagangan 7”Nomor 7”48/M-DAG/PER/7/2015 7”tentang 7”Ketentuan Umum 7”di 7”Bidang 7”Impor. 7”Di 7”dalam 7”peraturan 7”tersebut 7”diatur 7”mengenai persyaratan 7”administratif 7”negara 7”importir 7”yang 7”ingin 7”melakukan 7”impor 7”ke Indonesia, 7”membahas 7”juga 7”barang-barang 7”apa 7”saja 7”yang 7”dapat 7”di 7”impor 7”ke Indonesia, 7”serta 7”ketentuan 7”umum 7”dan 7”sanksi-sanksi 7”yang 7”diberlakukan kepada 7”para 7”importir 7”yang 7”melanggar 7”ketentuan 7”yang 7”telah 7”diatur. 7”Perihal pengaturan 7”persyaratan 7”administratif 7”berupa 7”perizinan 7”impor 7”dasar 7”yang harus dimiliki 7”oleh 7”setiap 7”importir 7”yang 7”diatur 7”dalam 7”Peraturan 7”Menteri Perdagangan 7”Nomor 7”70/M-DAG/PER/9/2015 7”tentang 7”Angka 7”Pengenal Importir. 7”

Pada 7”prinsipnya 7”mewajibkan 7”semua 7”Negara 7”anggota 7”WTO 7”untuk tidak 7”melakukan 7”diskriminasi 7”diantara 7”produk 7”yang 7”berasal 7”dari 7”Negara anggota 7”WTO 7”lainnya 7”terkait 7”dengan 7”tariff, 7”pajak 7”internal 7”dan 7”peraturan Nasional. 7”Artikel 7”I 7”Ayat 7”1 7”GATT 7”yang 7”berjudul 7”“*General* 7”*Most* 7”*Favoured* *Treatment*” 7”menyatakan 7”bahwa:

*With* 7”*respect* 7”*to* 7”*customs* 7”*duties* 7”*and* 7”*change* 7”*of* 7”*any* 7”*kind* 7”*imposed* 7”*on* *or* 7”*in* 7”*connection* 7”*with* 7”*importation* 7”*or* 7”*exportation* 7”*or* 7”*imposed* 7”*on* 7”*the* *internasional* 7”*transfer* 7”*of* 7”*payments* 7”*for* 7”*imports* 7”*or* 7”*exports,* 7”*and* 7”*with* *respect* 7”*to* 7”*the* 7”*method* 7”*of* 7”*levying* 7”*such* 7”*duties* 7”*and* 7”*charges,* 7”*and* 7”*with* *respect* 7”*to* 7”*all* 7”*rules* 7”*and* 7”*formalities* 7”*in* 7”*connection* 7”*with* 7”*importation* *and* 7”*exportation,* 7”*and* 7”*with* 7”*respect* 7”*to* 7”*all* 7”*matters* 7”*referred* 7”*to* 7”*in* *paragraphs* 7”*2* 7”*and* 7”*4* 7”*of* 7”*article* 7”*III,* 7”*any* 7”*advantage,* 7”*favour,* 7”*privilege* *or* 7”*immunity* 7”*granted* 7”*by* 7”*any* 7”*(member)* 7”*to* 7”*any* 7”*product* 7”*originating* 7”*in* *or* 7”*destined* 7”*for* 7”*any* 7”*other* 7”*country* 7”*shall* 7”*be* 7”*accorded* 7”*immediately* *and* *unconditionally* 7”*to* 7”*the* 7”*like* 7”*product* 7”*originating* 7”*in* 7”*or* 7”*destined* 7”*for* 7”*the* *territories* 7”*of* 7”*all* 7”*other* 7”*(Members).*

Dapat 7”diartikan 7”bahwa:

Dari 7”artikel 7”I 7”Ayat 7”1 7”ini 7”terdapat 7”empat 7”kewajiban 7”dari 7”Negara anggota 7”yang 7”mana 7”bahwa: 7”kewajiban 7”membayar 7”bea 7”cukai 7”atau pungutan-pungutan 7”lain 7”yang 7”akan 7”dikenakan 7”pada 7”barang-barang ekspor-impor, 7”atau 7”bea-bea 7”yang 7”dikenakan 7”pada 7”pembayaran internasional 7”yang 7”berhubungan 7”dengan 7”masalah 7”ekspor-impor, kewajiban 7”yang 7”menyangkut 7”metode 7”pengenaan 7”kewajiban 7”membayar bea 7”cukai 7”dan 7”pungutan 7”lain, 7”kewajiban 7”yang 7”menyangkut 7”segala peraturan 7”dan 7”formalitas 7”ekspor-impor, 7”serta 7”kewajiban 7”yang menyangkut 7”segala 7”masalah 7”yang 7”diatur 7”dalam 7”Artikel 7”III 7”Ayat 7”2 dan 7”Ayat 7”4 7”GATT 7”tentang 7”pajak-pajak 7”dalam 7”negeri.

Negara 7”anggota 7”juga 7”tidak 7”terikat 7”untuk 7”memberikan 7”perlakuan khusus 7”kepada 7”Negara 7”bukan 7”anggota 7”WTO. 7”Perlakuan 7”yang 7”diberikan kepada 7”Negara 7”bukan 7”anggota 7”WTO 7”sangat 7”tergantung 7”pada 7”perjanjian bilateral. 7”Namun 7”demikian, 7”apabila 7”Negara 7”bukan 7”anggota 7”tersebut memperoleh 7”manfaat 7”karenanya, 7”maka 7”manfaat 7”tersebut 7”harus 7”diberikan 7”pula kepada 7”Negara-negara 7”WTO. 7”Negara 7”WTO 7”berhak 7”memperoleh 7”perlakuan sama, 7”salah 7”satu 7”Negara 7”yang 7”memiliki 7”kaitan 7”dalam 7”permasalahan 7”impor pakaian 7”bekas 7”ini 7”adalah 7”Malaysia. 7”Menurut 7”Jemmy 7”Kartiwa 7”Sastraatmaja dalam 7”konferensi 7”pers 7”di 7”Jakarta, 7”Jumat, 7”31 7”Maret 7”2023 7”selaku 7”Ketua Asosiasi 7”Pertekstilan 7”Indonesia 7”(API) 7”menyatakan 7”bahwa: 7”“Sepanjang 7”tiga tahun 7”ini, 7”Malaysia 7”konsisten 7”berada 7”di 7”posisi 7”tertinggi 7”dalam 7”catatan ekspor pakaian 7”bekas 7”ke 7”Indonesia. 7”Pada 7”2020, 7”Malaysia 7”mengeskpor 7”sebanyak 22.842 7”ton. 7”Kemudian 7”25.323 7”ton 7”pada 7”2021, 7”dan 7”24.544 7”ton 7”pada 2022”.[[62]](#footnote-62) padahal 7”didalam 7”sektor 7”kepabeanan, 7”Indonesia 7”dan 7”Malaysia 7”telah 7”memiliki kerja 7”sama 7”seperti 7”Patkor 7”Katima 7”yang 7”mana 7”bentuk 7”kerjasama 7”bilateral dalam 7”memberantas 7”tindak 7”pidana 7”Penyelundupan 7”pakaian 7”bekas 7”atau *balepressed* 7”diperairan 7”Selat 7”Malaka. 7”

Salah 7”satu 7”bentuk 7”wujud 7”peraturan 7”yang 7”mengatur 7”terkait 7”pembatasan impor 7”barang 7”dalam 7”ruang 7”lingkup 7”internasional, 7”yaitu 7”terdapat 7”dalam 7”WTO *Agreement* 7”*on* 7”*Import* 7”*Licensing* 7”*Procedures*. 7”Berbeda 7”dengan 7”WTO, Indonesia 7”dalam 7”mengatur 7”batasan-batasan 7”terkait 7”impor 7”barangnya dijelaskan dalam 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”7 7”Tahun 7”2014 7”Pasal 7”35 7”mengenai 7”lararangan dan 7”pembatasan 7”perdagangan 7”barang 7”dan/atau 7”jasa. 7”Kemudian 7”dalam 7”Pasal 4, 5, 7”dan 7”6, 7”Peraturan 7”Menteri 7”Perdagangan 7”Nomor: 7”48/M-DAG/PER/7/2015 tentang 7”Ketentuan 7”Umum 7”di 7”Bidang 7”Impor 7”yang 7”mengelompokkan 7”barang impor 7”dalam 7”beberapa 7”kategori, 7”antara 7”lain 7”barang 7”bebas 7”impor, 7”barang dibatasi 7”impor, 7”dan 7”barang 7”yang 7”dilarang 7”untuk 7”diimpor.

Didalam prinsip WTO terdapat”hal yang dilarang”dalam”melakukan kegiatan impor, 7”yaitu 7”dalam 7”membatasi 7”kuota 7”barang. 7”Indonesia 7”menerapkan pembatasan dalam kegiatan 7impor barangnya”yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau 7”jasa, 7”yang 7”mana 7”mengatur 7”bahwa:

1. Pemerintah 7”menetapkan 7”larangan 7”atau 7”pembatasan 7”Perdagangan Barang 7”dan 7”/ 7”atau 7”Jasa 7”untuk 7”kepentingan 7”nasional 7”dengan alasan:
2. Melindungi 7”kedaulatan 7”ekonomi;
3. Melindungi 7”keamanan 7”Negara;
4. Melindungi 7”moral 7”dan 7”budaya 7”masyarakat;
5. Melindungi 7”kesehatan 7”dan 7”keselamatan 7”manusia, 7”hewan, 7”ikan, tumbuhan, 7”dan 7”lingkungan 7”hidup;
6. Melindungi 7”penggunaan 7”sumber 7”daya 7”alam 7”yang 7”berlebihan untuk 7”produksi 7”dan 7”konsumsi;
7. Melindungi 7”neraca 7”pembayaran 7”dan/ 7”atau 7”neraca 7”perdagangan;
8. Melaksanakan 7”peraturan 7”perundang-undangan 7”dan/ 7”atau;
9. Pertimbangan 7”tertentu 7”sesuai 7”dengan 7”tugas 7”Pemerintah.
10. Barang 7”dan/ 7”atau 7”jasa 7”jang 7”dilarang 7”atau 7”dibatasi 7”Perdagangan sebagaimana 7”dimaksud 7”pada 7”ayat 7”(1) 7”ditetapkan 7”di 7”Peraturan Presiden.

Tidak 7”hanya 7”itu, 7”Indonesia 7”juga 7”memberlakukan 7”Peraturan 7”Menteri Perdagangan 7”Nomor 7”48/MDAG/PER/7/2015 7”tentang 7”Ketentuan 7”Umum 7”di Bidang 7”Impor. 7”Peraturan 7”ini 7”mengatur 7”lebih 7”lanjut 7”terkait 7”batasan 7”barang yang 7”dapat 7”diimpor 7”di 7”Indonesia. 7”Terdapat 7”juga 7”perizinan 7”impor 7”yang berlaku 7”di 7”Indonesia. 7”Perizinan 7”tersebut 7”biasa 7”disebut 7”dengan 7”Perizinan Dasar 7”yang 7”dipersyaratkan 7”kepada 7”pendaftar 7”impor 7”untuk 7”memperoleh pengakuan 7”sebagai 7”importir 7”adalah 7”API 7”yang 7”diatur 7”dalam 7”Peraturan Menteri Perdagangan 7”Nomor 7”70/M-DAG/PER/9/2015 7”tentan 7”Angka 7”Pengenal Importir. 7Indonesia 7”masih 7”belum 7”menerapkan 7”seluruh 7”ketentuan 7”*Agreement* *on* *Import* 7”*Licensing* 7”*Procedures*, 7”khususnya 7”dibidang 7”pempublikasian 7”segala informasi 7”terkait 7”kegiatan 7”impor 7”dan 7”Indonesia 7”dalam 7”peraturan 7”pembatasan impor 7”barangnya 7”dengan 7”prinsip-prinsip 7”WTO 7”masih 7”belum 7”di 7”terapkan secara 7”jelas, 7”karena 7”dalam 7”peraturannya 7”Indonesia 7”tidak 7”mengatur 7”mengenai jumlah 7”kuota 7”yang 7”dapat 7”diimpor 7”ke 7”Indonesia. 7”Indonesia 7”hanya 7”mengatur segala 7”ketentuan 7”terkait 7”prosedur 7”administratif 7”saja.

Hal 7”ini 7”terlihat 7”juga 7”pada 7”penjelasan 7”diatas, 7”Negara 7”Malaysia 7”dengan adanya 7”perdagangan 7”bebas 7”ini 7”sangat 7”mudahnya 7”mengimpor 7”pakaian 7”bekas yang 7”mana 7”dapat 7”mengakibatkan 7”produk 7”tersebut 7”membuata 7”produk 7”lokal kurang 7”diminati 7”dimasyarakat. 7”Hal 7”ini 7”berbanding 7”terbaling 7”dengan 7”Pasal 7”35 Undang-Undang 7”Nomor 7”7 7”Tahun 7”2014 7”tentang 7”larangan 7”dan 7”pembatasan perdagangan 7”barang 7”dan/atau 7”jasa.

 Perdagangan 7”pakaian 7”bekas 7”impor 7”berkembang 7”karena 7”permintaan pasar 7”dan 7”kebutuhan 7”konsumen, 7”konsumen 7”lebih 7”tertarik 7”dengan 7”pakaian bekas 7”yang 7”berasal 7”dari 7”negara-negara 7”yang 7”memiliki 7”merek 7”terkenal (seperti Francis, 7”Italia, 7”Amerika, 7”yang 7”banyak 7”memiliki 7”merek 7”terkenal tersebar 7”di 7”kota-kota 7”mode 7”dunia) 7”dari 7”pada 7”membeli 7”pakaian 7”baru 7”lokal serta 7”impor 7”yang 7”kualitas 7”serta 7”mereknya 7”tidak 7”terkenal 7”seperti 7”Cina 7”dan Thailand. 7”Namun 7”sejak 7”ditetapkannya 7”Undang-Undang 7”Nomor 7”7 7”Tahun 2014 Tentang 7”Perdagangan 7”yaitu 7”pada 7”pasal 7”47 7”ayat 7”(1) 7”ditentukan 7”bahwa 7”setiap Importir 7”wajib 7”mengimpor 7”barang 7”dalam 7”keadaan 7”baru. 7”Serta 7”ditetapkannya Peraturan 7”Menteri 7”Perdagangan 7”Nomor 7”51/M-DAG/PER/7/2015 7”Tentang Larangan 7”Impor 7”Pakaian 7”Bekas 7”yang 7”dengan 7”tegas 7”menetapkan 7”dan mewajibkan 7”untuk 7”memusnahkan 7”pakaian 7”bekas 7”impor 7”yang 7”dipasarkan 7”di seluruh 7”Indonesia.

 Alasan-alasan 7”dilarangnya 7”impor 7”pakaian/baju 7”bekas 7”di 7”seluruh Indonesia 7”karena 7”dilatarbelakangi 7”oleh 7”ditemukannya 7”bakteri 7”dan 7”jamur yang dapat 7”menyebabkan 7”penyakit 7”kulit, 7”kelamin, 7”gangguan 7”pencernaan 7”dan berbagai 7”penyakit 7”menular 7”lainnya 7”oleh 7”Kementerian 7”Perdagangan bekerjasama 7”dengan 7”Direktorat 7”Jenderal 7”Standarisasi 7”Dan 7”Perlindungan Konsumen 7”maupun 7”oleh 7”Bea 7”Cukai 7”di 7”beberapa 7”kota 7”di 7”Indonesia 7”dengan mengambil 7”sampel 7”yang 7”diduga 7”pakain 7”bekas 7”impor. 7”Selain 7”itu, 7”kualitas pakain 7”bekas 7”impor 7”yang 7”tidak 7”layak 7”pakai 7”banyak 7”ditemukan 7”pada 7”saat pengujian 7”terhadap 7”dua 7”puluh 7”lima 7”sampel 7”yang 7”salah 7”satunya 7”dari 7”Pasar Senen, 7”Jakarta, 7”sampel 7”yang 7”diuji 7”diantaranya 7”pakaian 7”wanita 7”dewasa, pakaian 7”anak, 7”dan 7”juga 7”pakaian 7”pria 7”dewasa. 7”Alasan 7”lainnya 7”pakain 7”bekas impor 7”dilarang 7”dipasarkan 7”di 7”Indonesia 7”karena 7”dinilai 7”dapat 7”melemahkan pasaran 7”produk 7”pakaian 7”lokal.[[63]](#footnote-63)

Penetapan pasal 47”ayat”(1)”Undang-Undang Nomor”7 Tahun ”2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor”51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang 7”Larangan 7”Impor 7”Pakaian 7”Bekas 7”ternyata 7”tidak 7”harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 7”Tahun 7”1999 7”Tentang 7”Perlindungan 7”Konsumen 7”yang menetapkan 7”pada 7”pasal 7”8 7”ayat 7”(2) 7”bahwa 7”“Pelaku 7”usaha 7”dilarang memperdagangkan 7”barang 7”yang 7”rusak, 7”cacat 7”atau 7”bekas, 7”dan 7”tercemar 7”tanpa memberikan 7”informasi 7”secara 7”lengkap 7”dan 7”benar 7”atas 7”barang 7”dimaksud”. Apabila 7”diperhatikan 7”ketentuan 7”pasal 7”tersebut 7”dan 7”menganalisisnya 7”dengan *argumentum* 7*a* 7”*contrario* 7”maka 7”akan 7”mengakibatkan 7”diperbolehkannya 7”pelaku usaha 7”untuk 7”memperdagangkan 7”barang 7”bekas 7”termasuk 7”pakaian 7”bekas 7”impor dengan 7”syarat 7”memberikan 7”informasi 7”yang 7”sejelas-jelasnya 7”dan 7”sebenar-benarnya 7”kepada 7”konsumen 7”terkait 7”keadaan 7”dan 7”kualitas 7”barang 7”bekas 7”salah satunya 7”adalah 7”pakaian 7”bekas 7”tersebut.

Oleh karena 7ketentuan pasal 8 ayat (2)”Undang-Undang 7”Nomor 7”8 7”Tahun 1999 7”Tentang 7”Perlindungan 7”Konsumen 7”ini 7”belum 7”dihapuskan, 7”maka Penetapan ”pasal 47 ayat 7”(1) 7”Undang-Undang 7”Nomor 7 Tahun 7”2014 7”Tentang Perdagangan 7”secara 7”lengkap 7”menetapkan 7”sebagai 7”berikut:

1. Setiap 7”Importir 7”wajib 7”mengimpor 7”Barang 7”dalam 7”keadaan 7”baru;
2. Dalam 7”hal 7”tertentu 7”Menteri 7”dapat 7”menetapkan 7”Barang 7”yang diimpor 7”dalam 7”keadaan 7”tidak 7”baru;
3. Penetapan 7”sebagaimana 7”dimaksud 7”pada 7”ayat 7”(2) 7”disampaikan kepada 7”menteri 7”yang 7”menyelenggarakan 7”urusan 7”pemerintahan 7”di bidang 7”keuangan.
4. Ketentuan 7”lebih 7”lanjut 7”mengenai 7”penetapan 7”Barang 7”yang 7”diimpor dalam 7”keadaan 7”tidak 7”baru 7”sebagaimana 7”dimaksud 7”pada 7”ayat 7”(2) diatur 7”dengan 7”Peraturan 7”Menteri.

Sehingga 7”dapat 7”dirangkum 7”bahwa 7”pelarangan 7”impor 7”barang 7”dalam keadaan 7”bekas 7”dapat 7”dibatalkan/dikecualikan 7”apabila 7”dalam 7”keadaan 7”tertentu, serta 7”dalam 7”keadaan 7”tertentu 7”tersebut 7”ditetapkan 7”klasifikasi 7”barang 7”bekas yang 7”dimaksud 7”dengan 7”Peraturan 7”Menteri 7”Perdagangan, 7”kemudian disampaikan 7”kepada 7”Menteri 7”Keuangan 7”untuk 7”ditetapkan 7”Peraturan 7”Mentri Keuangan 7”terkait 7”impor 7”barang 7”bekas. 7”Sehingga 7”dapat 7”dikatakan 7”bahwa Peraturan 7”Menteri 7”Keuangan 7”terkait 7”impor 7”barang 7”bekas 7”tidak 7”mungkin lahir tanpa 7”persetujuan 7”Menteri 7”Perdagangan. 7”Namun, 7”terjadi 7”ketidaksesuaian norma 7”hukum 7”antara 7”Peraturan 7”Menteri 7”Perdagangan 7”dengan 7”Peraturan Menteri 7”Keuangan

Ketidaksesuaian 7”ini 7”mengakibatkan 7”ketidakpastian 7”hukum 7”dalam perkembangannya, 7”hal 7”ini 7”terlihat 7”dari 7”beberapa 7”kasus 7”yang 7”diputuskan 7”oleh hakim 7”Pengadilan 7”Negeri, 7”salah 7”satunya 7”yaitu 7”kasus 7”yang 7”terjadi 7”di 7”Kota Surabaya 7”dimana 7”hakim 7”memenangkan 7”importir 7”dan 7”memerintahkan 7”kepada petugas 7”Bea 7”Cukai 7”untuk 7”mengembalikan 7”semua 7”pakaian 7”bekas 7”impor 7”yang telah 7”disita 7”dengan 7”menyatakan 7”bahwa 7”penyitaan 7”yang 7”dilakukan 7”Bea 7”Cukai batal 7”demi 7”hukum.[[64]](#footnote-64)

Kasus 7”lainnya 7”terkait 7”dengan 7”impor 7”pakaian 7”bekas 7”terjadi 7”di Sulawesi Tenggara 7”dimana 7”hakim 7”juga 7”memenangkan 7”pelaku 7”usaha 7”dengan pertimbangan 7”bahwa 7”yang 7”dilarang 7”adalah 7”impor 7”(kegiatan 7”perdagangan 7”dari luar 7”negeri 7”ke 7”dalam 7”negeri), 7”sedangkan 7”perdagangan 7”pakaian 7”bekas 7”impor di 7”dalam 7”negeri 7”belum 7”dilarang/belum 7”ada 7”dasar 7”hukum 7”yang 7”kuat ”untuk menyita/menangkap 7”pakaian 7”bekas 7”dari 7”Sulawesi 7”Tenggara 7”ke 7”Jawa 7”Timur tersebut.[[65]](#footnote-65)

Namun 7”apabila 7”mengacu 7”pada 7”asas 7”preferensi 7”yaitu 7”lex 7”spesialis derogate 7”legi 7”generali 7”maka 7”peraturan 7”yang 7”dikeluarkan 7”oleh 7”Menteri Perdaganganlah 7”yang 7”seharusnya 7”dimenangkan 7”karena 7”bersifat 7”khusus dibandingkan 7”peraturan 7”yang 7”dikeluarkan 7”oleh 7”Menteri 7”Keuangan 7”dan Undang-Undang 7”Nomor 7”8 7”Tahun 7”1999 7”Tentang 7”Perlindungan 7”Konsumen. Namun, 7”masih 7”diperlukan 7”pengkajian 7”mendalam 7”terkait 7”hal 7”ini 7”karena Peraturan 7”Menteri 7”berada 7”di 7”bawah 7”Undang-Undang 7”berdasarkan 7”pasal 7”7 Undang-Undang 7”Nomor 7”11 7”Tahun 7”2012 7”Tentang 7”Pembentukan 7”Peraturan Perundang-Undangan 7”sehingga 7”berlaku 7”asas 7”preferensi 7”lex 7”superior 7”derogat legi 7”inferiori. 7”Namun 7”disisi 7”lain, 7”Peraturan 7”Menteri 7”Perdagangan 7”Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 7”Tentang 7”Larangan 7”Impor 7”Pakaian 7”Bekas 7”merupakan salah 7”satu 7”instrument 7”perlindungan 7”hukum. 7”Hal 7”ini 7”menjadi 7”menarik 7”dan urgen 7”untuk 7”diteliti 7”sehingga 7”dapat 7”ditemukan 7”kepastian 7”hukum 7”terkait impor pakaian 7”bekas 7”di 7”Indonesi.

 Pentingnya 7”dilakukan 7”penelitian 7”ini 7”juga 7”tdak 7”terlepas 7”dari pemaknaan impor 7”pakaian 7”bekas 7”itu 7”sendiri 7”yang 7”apabila 7”diihat 7”ketentuan 7”pasal 7”1 7”ayat (1) 7”Peraturan 7”Menteri 7”Perdagangan 7”Nomor 7”51/M-DAG/PER/7/2015 7”Tentang Larangan 7”Impor 7”Pakaian 7”Bekas, 7”maka 7”pengertian 7”impor 7”adalah 7”“kegiatan memasukkan 7”barang 7”ke 7”dalam 7”daerah 7”pabean”, 7”kemudian 7”pasal 7”2 7”Peraturan Menteri 7”ini 7”menetapkan 7”bahwa 7”“Pakaian 7”Bekas 7”dilarang 7”untuk 7”diimpor 7”ke dalam 7”wilayah 7”Negara 7”kesatuan 7”Republik 7”Indonesia”. 7”Maka 7”dapat dikomentari 7”bahwa 7”yang 7”dimaksud 7”dilarang 7”adalah 7”kegiatan 7”memasukkan barang 7”dari 7”luar 7”negeri 7”ke 7”wilayah 7”Indonesia, 7”sedangkan 7”apabila 7”pakaian bekas 7”tersebut 7”telah 7”terlanjur 7”berada 7”di 7”Indonesia 7”maka 7”tetap 7”diperbolehkan untuk 7”diperdagangkan. 7”Namun, 7”ketentuan 7”selanjutnya 7”yaitu 7”pasal 7”3 Peraturan Menteri 7”ini 7”menetapkan 7”bahwa 7”“Pakaian 7”Bekas 7”yang 7”tiba 7”di 7”wilayah Negara Kesatuan 7”Republik 7”Indonesia 7”pada 7”atau 7”setelah 7”tanggal 7”Peraturan 7”Menteri ini 7”berlaku 7”wajib 7”dimusnahkan 7”sesuai 7”ketentuan 7”peraturan 7”perundang-undangan”, 7”maka 7”yang 7”dimusnahkan 7”disini 7”adalah 7”pakaian 7”bekas 7”sebagai objek 7”peraturan, 7”sehingga 7”walaupun 7”pakaian 7”bekas 7”tersebut 7”terlanjur 7”ada 7”di Indonesia 7”tetap 7”dapat 7”dimusnahkan/ 7”dilarang 7”keberadaannya.

 Dari 7”penjelasan 7”diatas 7”dapat 7”disimpulkan 7”bahwa, 7”pada 7”penerapannya di Indonesia7”untuk prinsip 7*Non* 7”*diskriminatif* 7”tidak 7”dapat 7”diterapkan dikarenakan ada 7”peraturan 7”yang 7”di 7”Indonesia 7”tidak 7”sesuai 7”dengan pengaturan WTO 7”

**BAB** 7”**IV** 7”

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan tinjauan umum dan pembahasan yang dilakukan mengenai Tinjauan Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas Dalam Perspektif *World Trade Organization* dapat diuraikan kesimpulan bahwa

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota *Most Favoured Nations Treatment* *(MFN).* Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas *non diskriminasi*) tanpa syarat. Suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.
2. Perlakuan nasional (*National treatment*) Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Hal ini merujuk pada, impor pakaian bekas, yg mana setiap negara yang terikat WTO, tidak ada nya perbdaan baik dari pajak yang membentuk prinsip diskriminasi, semu disama ratakan.
3. Pada pokoknya penerapan prinsip *non diskriminasi* impor pakaian bekas di indonesia menganut Prinsip Most Favoured Nation yang selanjutnya disebut dengan prinsip MFN merupakn prinsip yang terpenting dalam hukum internasional, Secara ringkas MFN adalah prinsip perdagangan internasional antar negara anggota harus dilakukan secara non-diskriminasi hal ini laa prinsip ini yg dijalankan diindonesia berkaitan dengan impor pakaian bekas. Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu negara pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara perdagangan impor barang dari negara-negara lainnya. Setiap tindakan yang mendiskri- minasikan antara impor barang ke suatu negara dengan jasa-jasa dan pemasok jasa dari negara anggota lainnya bertentangan dengan persetujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATs). Konsekuensi dianutnya prinsip ini oleh GATs adalah setiap negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing, bertentangan dengan GATs kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penetapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN). Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijkasanaan perdagangan.
4. **Saran**
5. Saran 7”penulis 7”terkait 7”kedudukan 7”peraturan 7”mengenai 7”customs 7”valuation dalam 7”WTO 7”*Valuation* 7”*Agreement* 7”*dan* 7”*Advisory* 7”*Opinion,* 7”*Commentaries,* *Explanatory* 7”*Notes,* 7”*dan* 7”*Case* 7”*Studies* 7”yang 7”telah 7”dikeluarkan 7”WCO *Technical* 7”*Committee* 7”*on* 7”*Customs* 7”*Valuation* 7”*dalam* 7”*Valuation* *Compendium*-nya, 7”telah 7”cukup 7”jelas 7”dan 7”rinci 7”mengatur 7”teknis 7”dan tatacara 7”penetapan 7”nilai 7”pabean 7”termasuk 7”berbagai 7”kasus 7”dan 7”situasi 7”yang mungkin 7”terjadi 7”dalam 7”level 7”implementasi 7”telah 7”dibuatkan 7”solusi 7”dan pertimbangan 7”hukumnya 7”secara 7”detil 7”dengan 7”mengacu 7”pada 7”Prinsip-prinsip 7”article 7”VII 7”GATT. 7”Dengan 7”demikian, 7”seyogyanya 7”dapat 7”dijadikan guidance 7”untuk 7”negararanegara 7”anggota 7”guna 7”mengadopsi 7”dan menerapkannya 7”dalam 7”legislasi 7”nasional 7”mereka 7”dengan 7”pertimbangan yang 7”lebih 7”luas 7”guna 7”terciptanya 7”tatanan 7”perdagangan 7”dunia 7”yang 7”tertib sebagaiman 7”Tujuan 7”dari 7”Hukum 7”perdagangan 7”Interasional 7”menurut 7”GATT dan 7”WTO.
6. Pemerintah 7”Indonesia 7”perlu 7”melakukan 7”penyesuaian 7”lebih 7”lanjut 7”terkait transparansi 7”dan 7”lisensi 7”non-otomatis 7”dalam 7”regulasi 7”nasioal 7”yang disesuaikan 7”dengan 7”WTO 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Import* 7”*Licensing* 7”*Procedures*. Hal 7”ini 7”karena 7”Indonesia 7”telah 7”mempunyai 7”kewajiban 7”nasional 7”untuk menerapkan 7”segala 7”ketentuan 7”WTO.
1. Rinsa, “Liberalisasi Perdagangan Dan Neoliberalisme,” Kompas, 2011, http://kompas.com/opini/2068215.htm. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ria Ariesti Br Sitepu and Ika Riswanti Putranti, “Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas Ke Indonesia,” *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 4, no. 3 (2018): 412–19, https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21064. [↑](#footnote-ref-2)
3. World Trade Organization, “Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization,” 2023, https://www.wto.org/english/docs\_e/legal\_e/04-wto\_e.htm#top. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sitepu and Putranti, “Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas Ke Indonesia.” [↑](#footnote-ref-4)
5. Annisa Medina Sari, “Dasar Hukum Dan Dampak Impor Pakaian Bekas Di Indonesia,” UMSU, 2023, https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/. [↑](#footnote-ref-5)
6. Martha Warta Silaban, “Terkini Bisnis: Pakaian Bekas Impor Dari Malaysia, Total Investasi Objek Wisata KEK Lido,” Tempo.co, 2023, https://bisnis.tempo.co/read/1709914/terkini-bisnis-pakaian-bekas-impor-dari-malaysia-total-investasi-objek-wisata-kek-lido. [↑](#footnote-ref-6)
7. World Trade Organization, *Agreement on Import Licensing Agreement* (New York: World Trade Organization, 1994). [↑](#footnote-ref-7)
8. Adi Ahdiat, “10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar Ke Indonesia,” databoks, 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia. [↑](#footnote-ref-8)
9. 7”Sefriani, 7”*Peran* 7”*Hukum* 7”*Internasional* 7”*Dalam* 7”*Hubungan* 7”*Internasional* 7”*Kontemporer* 7”(Jakarta: 7”RajaGrafindo 7”Persada, 7”2015), 7”236. [↑](#footnote-ref-9)
10. 7”Ika 7”Wahyuning 7”Widiarti, 7”“Pengelolaan 7”Sampah 7”Berbasis 7”‘Zero 7”Waste’ 7”Skala 7”Rumah 7”Tangga 7”Secara 7”Mandiri,” 7”*Jurnal* 7”*Sains* 7”*&Teknologi* 7”*Lingkungan* 7”4, 7”no. 7”2 7”(September 7”13, 7”2012): 7”101–13, 7”https://doi.org/10.20885/jstl.vol4.iss2.art4. [↑](#footnote-ref-10)
11. 7”Rizki 7”Zakiyah 7”et 7”al., 7”“Diplomasi 7”Multilateral: 7”Buletin 7”Direktorat 7”Jenderal 7”Multilateral 7”Kementerian 7”Luar 7”Negeri,” 7”*Jurnal* 7”*Diplomasi* 7”*Multilateral* 7”3, 7”no. 7”2 7”(2014): 7”1–49. [↑](#footnote-ref-11)
12. 7”Avinash 7”Dixit 7”and 7”Victor 7”Norman, 7”*Theory* 7”*of* 7”*International* 7”*Trade:* 7”*A* 7”*Dual,* 7”*General* 7”*Equilibrium* 7”*Approach* 7”(Cambridge: 7”Cambridge 7”University 7”Press, 7”1980), 7”https://doi.org/10.1017/CBO9780511628627. [↑](#footnote-ref-12)
13. 7”Georg 7”Wilhelm 7”Friedrich 7”Hegel, 7”*Georg* 7”*Wilhelm* 7”*Friedrich* 7”*Hegel* 7”(Yogyakarta: 7”Pustaka 7”Pelajar, 7”2015), 7”302. [↑](#footnote-ref-13)
14. 7”Arif 7”Lutvi 7”Anshori, 7”“Rezim 7”HKI 7”Sebagai 7”Konsep 7”Perlindungan 7”Hak 7”Kekayaan 7”Intelektual 7”Atas 7”Pengetahuan 7”Tradisional 7”(Traditional 7”Knowledge) 7”Di 7”Indonesia” 7”(Skripsi. 7”Universitas 7”Islam 7”Indonesia, 7”2008), 7”10. [↑](#footnote-ref-14)
15. 7”Jenik 7”Radon, 7”“Sovereignty: 7”A 7”Political 7”Emotion, 7”Not 7”a 7”Concept,” 7”*Stanford* 7”*Journal* 7”*of* 7”*International* 7”*Law* 7”40, 7”no. 7”2 7”(2004): 7”195–209. [↑](#footnote-ref-15)
16. 7”Bahder 7”Johan 7”Nasution, 7”*Metode* 7”*Penelitian* 7”*Hukum* 7”(Bandung: 7”Mandar 7”Maju, 7”2008), 7”87. [↑](#footnote-ref-16)
17. 7”Peter 7”Mahmud 7”Marzuki, 7”*Penelitian* 7”*Hukum* 7”(Jakarta: 7”Kencana, 7”2008), 7”93. [↑](#footnote-ref-17)
18. 7”Sefriani, 7”*Peran* 7”*Hukum* 7”*Internasional* 7”*Dalam* 7”*Hubungan* 7”*Internasional* 7”*Kontemporer*, 7”236. [↑](#footnote-ref-18)
19. 7”Sefriani, 7”237. [↑](#footnote-ref-19)
20. 7”Huala 7”Adolf, 7”*Hukum* 7”*Perdagangan* 7”*Internasional* 7”(Jakarta: 7”RajaGrafindo 7”Persada, 7”2016), 7”109. [↑](#footnote-ref-20)
21. 7”World 7”Trade 7”Organization, 7”*The* 7”*Legal* 7”*Texts:* 7”*The* 7”*Results* 7”*of* 7”*the* 7”*Uruguay* 7”*Round* 7”*of* 7”*Multilateral* 7”*Trade* 7”*Negotiations* 7”(Uruguay: 7”World 7”Trade 7”Organization, 7”2002), 7”286. [↑](#footnote-ref-21)
22. 7”Ida 7”Bagus 7”Wyasa 7”Putra 7”and 7”Ni 7”Ketut 7”Supasti 7”Dharmawan, 7”*Hukum* 7”*Perdagangan* 7”*Internasional* 7”(Bandung: 7”Refika 7”Aditama, 7”2017), 7”91. [↑](#footnote-ref-22)
23. 7”Sefriani, 7”*Peran* 7”*Hukum* 7”*Internasional* 7”*Dalam* 7”*Hubungan* 7”*Internasional* 7”*Kontemporer*, 7”237. [↑](#footnote-ref-23)
24. 7”Sefriani, 7”238. [↑](#footnote-ref-24)
25. 7”Sefriani, 7”240. [↑](#footnote-ref-25)
26. 7”Suci 7”Yunita 7”Siregar, 7”“Penerapan 7”Prinsip 7”Non-Diskriminasi 7”Pada 7”Sistem 7”Perdagangan 7”Multirlateral 7”Dalam 7”Kerangka 7”WTO 7”(World 7”Trade 7”Organization)” 7”(Skripsi. 7”Universitas 7”Sumatera 7”Utara, 7”2007), 7”61. [↑](#footnote-ref-26)
27. 7”Marolop 7”Tandjung, 7”*Aspek* 7”*Dan* 7”*Prosedur* 7”*Ekspor-Impor* 7”(Jakarta: 7”Salemba 7”Empat, 7”2011), 7”139. [↑](#footnote-ref-27)
28. 7”Andi 7”Susilo, 7”*Buku* 7”*Pintar* 7”*Ekspor-Impor* 7”(Jakarta: 7”Visimedia, 7”2008), 7”101. [↑](#footnote-ref-28)
29. 7”Astuti 7”Purnamawati, 7”*Dasar-Dasar* 7”*Ekspor* 7”*Impor:* 7”*Teori,* 7”*Praktik* 7”*Dan* 7”*Prosedur* 7”(Yogyakarta: 7”UPP 7”STIM 7”YKPN, 7”2013), 7”13. [↑](#footnote-ref-29)
30. 7”Radiks 7”Purba, 7”*Pengetahuan* 7”*Perdagangan* 7”*Luar* 7”*Negeri* 7”*Indonesia* 7”(Jakarta: 7”Pustaka 7”Dian, 7”1983), 7”51. [↑](#footnote-ref-30)
31. 7”Adrian 7”Sutedi, 7”*Hukum* 7”*Ekspor* 7”*Impor* 7”(Jakarta: 7”Raih 7”Asa 7”Sukses, 7”2014), 7”11. [↑](#footnote-ref-31)
32. 7”Didik 7”Sasono 7”Setyadi, 7”*Aspek* 7”*Hukum* 7”*Administrasi* 7”*Kegiatan* 7”*Usaha* 7”*Hulu* 7”*Minyak* 7”*Dan* 7”*Gas* 7”*Bumi* 7”(Jakarta: 7”Wisnu 7”Inter 7”Sains 7”Hakiki, 7”2012), 7”107. [↑](#footnote-ref-32)
33. 7”Setyadi, 7”107. [↑](#footnote-ref-33)
34. 7”Wikipedia, 7”“Organisasi 7”Perdagangan 7”Dunia,” 7”Wikipedia 7”Ensiklopedia 7”Bebas, 7”2023, 7”https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\_Perdagangan\_Dunia. [↑](#footnote-ref-34)
35. 7”Peter 7”van 7”den 7”Bossche, 7”Daniar 7”Natakusumah, 7”and 7”Joseph 7”Wira 7”Koesnaidi, 7”*Pengantar* 7”*Hukum* 7”*WTO* 7”*(World* 7”*Trade* 7”*Organization)* 7”(Jakarta: 7”Yayasan 7”Obor 7”Indonesia, 7”2010), 7”92. [↑](#footnote-ref-35)
36. 7”Triyana 7”Yohanes, 7”*Hukum* 7”*Ekonomi* 7”*Internasional:* 7”*Perspektif* 7”*Kepentingan* 7”*Negara* 7”*Sedang* 7”*Berkembang* 7”*Dan* 7”*LDCs* 7”(Yogyakarta: 7”Cahaya 7”Atma 7”Pustaka, 7”2015), 7”70. [↑](#footnote-ref-36)
37. 7”Yohanes, 7”45–46. [↑](#footnote-ref-37)
38. 7”Hatta, 7”*Aspek-Aspek* 7”*Hukum* 7”*Dan* 7”*Non* 7”*Hukum* 7”*Perdagangan* 7”*Internasional* 7”*Dalam* 7”*Sistem* 7”*GATT* 7”*Dan* 7”*WTO* 7”(Bandung: 7”Refika 7”Aditama, 7”2006), 7”2. [↑](#footnote-ref-38)
39. 7”Hatta, 7”37. [↑](#footnote-ref-39)
40. 7”Hatta, 7”38. [↑](#footnote-ref-40)
41. 7”Hatta, 7”76–77. [↑](#footnote-ref-41)
42. 7”Bossche, 7”Natakusumah, 7”and 7”Koesnaidi, 7”*Pengantar* 7”*Hukum* 7”*WTO* 7”*(World* 7”*Trade* 7”*Organization)*, 7”3. [↑](#footnote-ref-42)
43. 7”Bossche, 7”Natakusumah, 7”and 7”Koesnaidi, 7”68–69. [↑](#footnote-ref-43)
44. 7”Bossche, 7”Natakusumah, 7”and 7”Koesnaidi, 7”60. [↑](#footnote-ref-44)
45. 7”United 7”Nations 7”Conference 7”on 7”Trade 7”and 7”Development, 7”*Training* 7”*Module* 7”*on* 7”*The* 7”*WTO* 7”*Agreement* 7”*on* 7”*Anti-Dumping* 7”(New 7”York: 7”United 7”Nations, 7”2006), 7”3. [↑](#footnote-ref-45)
46. 7”Huala 7”Adolf, 7”*Hukum* 7”*Perdagangan* 7”*Internasional:* 7”*Prinsip-Prinsip* 7”*Dan* 7”*Konsepsi* 7”*Dasar* 7”(Jakarta: 7”Rajawali 7”Pers, 7”2004), 7”32. [↑](#footnote-ref-46)
47. 7”Adolf, 7”43. [↑](#footnote-ref-47)
48. 7”Sefriani, 7”*Peran* 7”*Hukum* 7”*Internasional* 7”*Dalam* 7”*Hubungan* 7”*Internasional* 7”*Kontemporer*, 7”236. [↑](#footnote-ref-48)
49. 7”Sefriani, 7”56. [↑](#footnote-ref-49)
50. 7”Adolf, 7”*Hukum* 7”*Perdagangan* 7”*Internasional*, 7”109. [↑](#footnote-ref-50)
51. 7”Adolf, 7”240. [↑](#footnote-ref-51)
52. 7”Siregar, 7”“Penerapan 7”Prinsip 7”Non-Diskriminasi 7”Pada 7”Sistem 7”Perdagangan 7”Multirlateral 7”Dalam 7”Kerangka 7”WTO 7”(World 7”Trade 7”Organization),” 7”61. [↑](#footnote-ref-52)
53. 7”Siregar, 7”39. [↑](#footnote-ref-53)
54. 7”H. 7”S. 7”Kartadjoemena, 7”*GATT,* 7”*WTO,* 7”*Dan* 7”*Hasil* 7”*Uruguay* 7”*Round* 7”(Jakarta: 7”UI 7”Press, 7”1997). [↑](#footnote-ref-54)
55. 7”Alina 7”Kaczorowska-Ireland, 7”*Public* 7”*International* 7”*Law* 7”(London: 7”Routladge, 7”2002). [↑](#footnote-ref-55)
56. 7”Luc 7”De 7”Wulf 7”and 7”José 7”B. 7”Sokol, 7”*Customs* 7”*Modernization* 7”*Handbook* 7”(Washington, 7”D.C.: 7”The 7”World 7”Bank, 7”2005), 7”158. [↑](#footnote-ref-56)
57. Konsideran 7”menimbang 7”huruf 7”c, 7”Undang-Undang 7”Tentang 7”Kepabeanan, 7”UU 7”No.10 7”Tahun 7”1995 7”LN 7”No.75 7”Tahun 7”1995,TLN 7”No.3612 7”sebagaimana 7”telah 7”diubah 7”dengan 7”UU 7”No.17 7”Tahun 7”2006 7”LN 7”No.93 7”Tahun 7”2006, 7”TLN 7”No.4661 [↑](#footnote-ref-57)
58. 7”*Ibid.* [↑](#footnote-ref-58)
59. 7”Eddy 7”Pratomo, 7”*Hukum* 7”*Perjanjian* 7”*Internasional* 7”*Dinamika* 7”*Dan* 7”*Tinjauan* 7”*Kritis* 7”*Terhadap* 7”*Politik* 7”*Hukum* 7”*Indonesia* 7”(Jakarta: 7”Gramedia, 7”2016), 7”407. [↑](#footnote-ref-59)
60. 7”Pratomo, 7”408. [↑](#footnote-ref-60)
61. 7”Pratomo, 7”409. [↑](#footnote-ref-61)
62. 7”Silaban, 7”“Terkini 7”Bisnis: 7”Pakaian 7”Bekas 7”Impor 7”Dari 7”Malaysia, 7”Total 7”Investasi 7”Objek 7”Wisata 7”KEK 7”Lido.” [↑](#footnote-ref-62)
63. 7”Vicki 7”Febrianto, 7”“Pakaian 7”Impor 7”Bekas 7”Terbukti 7”Mengandung 7”Bakteri,” 7”Antara 7”News, 7”2015, 7”https://www.antaranews.com/berita/478146/pakaian-impor-bekas-terbukti-mengandung-bakteri. [↑](#footnote-ref-63)
64. 7”Muhammad 7”Taufik, 7”“Juragan 7”Pakaian 7”Bekas 7”Kalahkan 7”Bea 7”Cukai 7”Di 7”Pengadilan 7”Surabaya,” 7”Surya.co.id, 7”2015, 7”https://surabaya.tribunnews.com/2015/06/10/juragan-pakaian-bekas-kalahkan-bea-cukai-di-pengadilan-surabaya. [↑](#footnote-ref-64)
65. 7”Estu 7”Suryowati, 7”“Pemerintah 7”Siapkan 7”Perpres 7”Pelarangan 7”Impor 7”Pakaian 7”Bekas,” 7”Kemendag, 7”2015, 7”http://www.kemendag.go.id/id/news/2015/07/14/pemerintah-siapkan-perpres-pelarangan-imporpakaian-bekas. [↑](#footnote-ref-65)